

**Pengaruh Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi Dan Sistem
Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah**

(Studi Kasus Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kota Bandung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam
Menempuh Ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Pada
Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama



Disusun oleh :

NAMA : Ruri Windiastuti

NRP : 01.09.U304

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS WIDYATAMA

Terakreditasi (*Accredited*)

SK. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN- PT)

Nomor : 014/BAN-PT/AK-XII/S1/VI/2009

Tanggal 12 Juni 2009

BANDUNG
2013

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ruri Windiastuti

NPM : 01.09.U304

Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 3 Mei 1991

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pengaruh Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”** merupakan hasil karya saya selaku penulis. Apabila terbukti bukan hasil karya saya sendiri, saya bersedia menerima segala sanksi sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya dan benar adanya.

Bandung, September 2013

Penulis,

Ruri Windiastuti

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan rahmat Allah SWT, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran-Nya yang telah memberikan segala anugerah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: **“PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG AKUNTANSI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH”**. Maksud penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Universitas Widyatama.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan kemampuan, pengalaman, dan pengetahuan penulis baik dalam hal penyajian maupun pengguna bahasa. Namun demikian inilah yang terbaik yang penulis lakukan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Oleh karena itu semua masukan, kritik, dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan bagi penyempurnaan skripsi ini.

Selama persiapan, penyusunan, sampai dengan penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, bantuan, dan dorongan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan ketulusan hati yang paling mendalam, penulis mengucapkan terimakasih yang begitu besar kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan kasih sayang, berkah, rahmat dan karunia-Nya yang begitu besar kepada penulis.
2. Papa, Mama dan Kaka tercinta atas semua kasih sayang, bantuan, dukungan moril dan materil, nasihat serta doa yang telah diberikan kepada penulis selama ini.
3. Ibu Dini Arwaty, S.E., M.Si., Ak. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan petunjuk, pengetahuan, bimbingan, dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini.

4. Alm. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah A,K,M.S., Ak., selaku Ketua Badan Pengurus Yayasan Widyatama.
5. Bapak Dr. H. Mame S. Soetoko, Ir., DEA, selaku Rektor Universitas Widyatama.
6. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.
7. Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.
8. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Widyatama, yang telah membimbing, mendidik, dan memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
9. Seorang laki-laki yang setia menemani baik dalam suka maupun duka serta yang selalu mendoakan, memberi dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, Elzan Kurnia Oktajaya
10. Sahabat setia yang selalu menghibur, menjadi rumah kedua dan menyemangati penulis, Rafika, Ratukica, Riri, Karina dan Ivia
11. Sahabat terbaik yang selalu menemani, memberikan bantuan, tawa, canda, dan dukungan selama menyelesaikan skripsi, Rahmalia, Gitta, Ardhan, Reyza, Adika, Teh Ajriya
12. Sahabat kampus seperjuangan, Shannaz, Vina, Mpit, Hadi, Amni, Ryan, Arisa, Anisa Erma, Shandi , Eqy, Fahmi, Galuh, Wenda, Shindy, Ahira, Maya, Novita, Aditya, Azie, Ale, Wildan, Ekky, Viqy Dan Teman-teman 2009 lainnya.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, yang telah memberikan bantuan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih yang tidak terhingga pada semua pihak yang terlibat, dengan harapan semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Semoga Allah SWT membalas perbuatan kita, Amin.

Bandung, september 2013

Penulis



ABSTRAK
**Pengaruh Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi Dan Sistem
Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah**

(Studi Kasus Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kota Bandung)

Otonomi Daerah menuntut Pemerintah Daerah untuk dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan tersebut adalah memberikan informasi keuangan yang transparan dan akuntabel. Masih adanya hasil audit laporan keuangan daerah yang opininya *disclaimer* menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan daerah tersebut masih memerlukan penyempurnaan secara terus menerus. Faktor yang sangat berpotensi dalam mempengaruhi baik buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, kualitas laporan pemerintah pusat dan daerah harus memenuhi karakteristik kualitatif, yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah Kota Bandung.

Penelitian dilakukan pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung dengan bagian akuntansi sebagai sampelnya. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada seluruh pegawai yang ada di bidang akuntansi sejumlah 19 orang dan seluruh kuesioner dapat diterima kembali untuk diolah. Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Setelah data dikumpulkan, data dianalisis menggunakan program SPSS 20.0 for windows.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Selain itu secara bersama-sama Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal mampu mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kota Bandung.

Kata kunci: sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Kegunaan Penelitian.....	9
1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Sumber Daya Manusia	11
2.1.1 Sistem Pengendalian Internal.....	14
2.1.1.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal.....	15
2.1.2.2 Tujuan Pengendalian Internal.....	16
2.1.2.3 Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Internal ...	17
2.1.2.4 Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab dalam Sistem pengendalian Internal	20
2.1.3 Laporan Keuangan Daerah.....	21
2.1.3.1 Pengertian Laporan Keuangan Daerah.....	21
2.1.3.2 Komponen Laporan Keuangan Daerah	23
2.1.3.3 Kualitas Laporan Keuangan	27
2.2 Kerangka Pemikiran.....	30
2.3 Hipotesis Penelitian.....	34

BAB III OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN

3.1	Objek Penelitian	36
3.1.1	Sejarah Singkat DPKAD Kota Bandung	36
3.1.2	Visi Misi DPKAD Kota Bandung.....	38
3.1.3	Struktur Organisasi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.....	39
3.1.4	Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelola Keuangan daerah Kota Bandung	40
3.2	Metode Penelitian.....	42
3.2.1	Teknik Pengumpulan Data	42
3.2.2	Operasionalisasi Variabel Penelitian	46
3.3	Metode Analisis Data.....	47
3.3.1	Analisis Statistik dan Pengujian Hipotesis	47
3.3.2	Uji Kualitas Data.....	48
3.3.2.1	Uji Validitas	48
3.3.2.2	Uji Reliabilitas	49
3.3.3	Uji Asumsi Klasik	50
3.3.3.1	Uji Normalitas Data	50
3.3.3.2	Uji Multikolinearitas.....	51
3.3.3.3	Uji Heteroskedastisitas.....	51
3.3.3.4	Analisis Regresi Linier Berganda	52
3.3.3.5	Analisis Koefisien Determinasi (R^2).....	53
3.3.3.6	Penarikan Kesimpulan	54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Hasil Penelitian	55
4.1.1	Kompetensi Sumber Daya Manusia.....	55

4.1.2	Sistem Pengendalian Internal	61
4.1.3	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	69
4.1.4	Uji Validitas dan Realibilitas	75
4.1.5	Pengujian Asumsi Klasik	80
4.1.5.1	Uji Normalitas Data	80
4.1.5.2	Uji Heteroskedastisitas.....	81
4.1.5.3	Uji Multikolinearitas	83
4.1.6	Analisis Regresi Linier Berganda	84
4.1.6.1	Analisis Koefisien Determinasi	86
4.1.6.2	Uji Simultan (Uji F)	87
4.1.6.3	Uji Parsial (Uji T).....	88
4.2	Pembahasan.....	88
4.2.1	Kompetensi SumberDaya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah	91
4.2.2	Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah	92
4.2.3	Kualitas Laporan Keuangan Daerah	95

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan	97
5.2	Saran	98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	1.1	Data Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	4
Tabel	1.2	Data Pegawai berdasarkan Tingkat pendidikan akhir	5
Tabel	1.3	Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan	5
Tabel	1.4	Data Pegawai Berdasarkan Penglaman Kerja Bidang Keuangan	6
Tabel	3.1	Pemberian Skor Jawaban Skala Likert	44

Tabel	3.2	Operasionalisasi Variabel, Dimensi, Indikator, Skala Pengukuran dan Instrument	46
Tabel	4.1	Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Latar Belakang	56
Tabel	4.2	Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Pendidikan dan Pelatihan	57
Tabel	4.3	Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Pengalaman di Bidang Akuntansi	59
Tabel	4.4	Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia	60
Tabel	4.5	Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Lingkungan Pengendalian	61
Tabel	4.6	Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Penilaian Resiko	63
Tabel	4.7	Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Kegiatan Pengendalian	64
Tabel	4.8	Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Informasi dan Komunikasi	66
Tabel	4.9	Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Pemantauan	67
Tabel	4.10	Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Variabel sistem pengendalian internal	67
Tabel	4.11	Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Relevansi	69
Tabel	4.12	Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Andal	70
Tabel	4.13	Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Dapat Dibandingkan	72
Tabel	4.14	Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Dapat Dipahami	73
Tabel	4.15	Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	74
Tabel	4.16	Hasil Uji Validitas Dan Realibilitas Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia	76
Tabel	4.17	Hasil Uji Validitas dan Realibilitas Variabel Sistem Pengendalian Internal	77
Tabel	4.18	Hasil Uji Validitas dan Realibilitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	79
Tabel	4.19	Uji Multikolinearitas	83
Tabel	4.20	Persamaan Regresi Linier Berganda	85
Tabel	4.21	Koefisien Determinasi	86
Tabel	4.22	Uji Anova (Simultan)	87
Tabel	4.23	Uji Parsial	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran	34
Gambar 4.1 Garis Kontinum Variabel sumber daya manusia	60
Gambar 4.2 Garis Kontinum Variabel sistem pengendalian internal	68
Gambar 4.3 Garis Kontinum Variabel kualitas laporan keuangan	75
Gambar 4.4 uji normalitas p-p plot	81
Gambar 4.5 uji heteroskedastisitas.....	82



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran A Data Kuesioner
- Lampiran B Hasil Tabulasi
- Lampiran C Output SPSS
- Lampiran D Surat Survei
- Lampiran E Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran F Riwayat Hidup Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Suatu organisasi yang didirikan seiring diberlakukannya UU No. 33 tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan terus dilakukan evaluasi dan evolusi, selanjutnya reformasi pengelolaan keuangan Negara oleh pemerintah salah satunya ditetapkan UU No.17 tahun 2003 tentang keuangan Negara. Pada UU No. 17 tahun 2003 khususnya pasal 31, disebutkan bahwa Gubernur/Bupati/Wali Kota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggung jawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Dalam standar akuntansi pemerintahan (SAP). UU no 71 thn 2010 tentang SAP dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik, relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan pemerintah yang berkualitas. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan SDM yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintah, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan.

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten tersebut

akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (**Warisno, 2008**).

Pendidikan merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia terutama untuk pengembangan aspek intelektual dan kepribadian manusia. Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan formal dalam organisasi merupakan suatu proses mengembangkan kemampuan ke arah yang diinginkan.

Tingkat pendidikan sering kali menjadi indikator yang menunjukkan derajat intelektualitas seseorang, semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi pengetahuan dan tingkat intelektualitas seseorang. Dengan tingkat pendidikan yang memadai seseorang lebih mudah melaksanakan tugasnya. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik SKPD harus memiliki Sumber Daya Manusia yang kompeten dengan dilatar belakangi pendidikan akuntansi atau keuangan.

Pengalaman kerja di dalam suatu organisasi pun menjadi salah satu indikator bahwa seseorang telah memiliki kemampuan yang lebih. Semakin lama pegawai bekerja dalam suatu bidang di organisasi, maka semakin berpengalaman pegawai tersebut dan semakin memahami apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepada pegawai tersebut.

Begitupun dalam penyusunan laporan keuangan daerah, SKPD diharapkan memiliki sumber daya manusia yang telah memiliki pengalaman kerja yang lebih lama di bidang akuntansi atau keuangan, karena dalam menyusun laporan keuangan dibutuhkan pegawai yang benar-benar memahami akuntansi atau keuangan beserta aturan-aturan dalam penyusunan laporan keuangan daerah.

Selain itu, hal yang mendasar dan penting dari penerapan akuntansi di dalam penyusunan laporan keuangan daerah salah satunya adalah sistem akuntansi. Sebagaimana pengertian dari sistem akuntansi keuangan daerah yaitu serangkaian prosedur dari mulai proses pengumpulan data, pencatatan,

pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Permendagri No. 59 tahun 2007).

Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilain berupa opini dari badan pengawas keuangan (BPK). Terdapat 4 opini yang diberikan pemeriksa yaitu : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan pernyataan Menolak Memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah daerah merupakan suatu hal yang menarik untuk di kaji lebih lanjut. Dari berbagai tulisan yang diambil di-download dari internet, ternyata di dalam laporan keuangan pemerintah daerah masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai. Selain itu juga masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh badan pemeriksa keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah.”badan pemeriksaan keuangan republik Indonesia (BPK RI) memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPD tahun 2011. Opini ini menurun jika dibandingkan dengan opini yang di berikan BPK RI atas LKPD tahun 2010. (www.bpk.go.id)

Hasil laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) kabupaten tasikmalaya dari tahun 2005 sampai tahun 2010, mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) (<http://www.bpk.go.id>) adapun untuk hasil pemeriksa LKPD tahun anggaran 2011, BPK kembali member opini WDP. Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS) 1 tahun 2011 (<http://www.bpk.go.id>) LKPD tahun 2010 menunjukkan kenaikan opini WTP dan WDP dibanding tahun tahun sebelumnya. Hal ini menggambarkan adanya perbaikan sistem pengelolaan dan tanggung jawab khususnya dalam pencatatan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Walau demikian, BPK juga masih menemukan kelemahan pengendalian akuntansi dan pelaporan yaitu kelemahan pengendalian akuntansi dan pelaporan yaitu

kelemahan pengendalian yang terkait kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan.

Kepala badan pengawasan dan pembangunan (BPKP) perwakilan jawa barat, Tahria Syafrudin menilai, minimnya kualitas sumber daya manusia (SDM) masih menjadi faktor utama yang menjadi titik lemahnya penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (pemda) di jawa barat. Asisten VI bidang administrasi pemprov jawabarat, Iwa Karniwa membenarkan minimnya tenaga SDM yang memiliki latar belakang akuntansi dan auditor sehingga menjadi kendala dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (<http://pikiran-rakyat.com/node/171153>).

Berikut disajikan data kepegawaian bidang Akuntansi di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

a. Latar Belakang Pendidikan

Tabel 1.1
Data Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
Keuangan	4	21,05%
Non-keuangan	15	78,95%
Total	19	100 %

Sumber: DPKAD

Dari tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai yang berlatar belakang pendidikan keuangan hanya sebanyak 4 orang atau sebesar 21,05% dari total pegawai di bidang akuntansi. Pegawai yang berlatar belakang pendidikan non-keuangan lebih mendominasi sebanyak 15 orang atau sebesar 78,95% dari total pegawai di bidang akuntansi.

b. Tingkat Pendidikan Terakhir

1.2

Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah (orang)	
	Keuangan	Non-Keuangan
SD – SMA	-	5
D3	1	-
S1	2	6
S2	1	4
S3	-	-
Total	19	

Sumber: DPKAD

Dari tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan S1 bidang keuangan hanya 2 orang dari total 19 orang pegawai di bidang Akuntansi. Meskipun tingkat pendidikan S2 sebanyak 5 orang, tetapi hanya 1 yang berlatar belakang pendidikan keuangan.

c. Pendidikan dan Pelatihan

Tabel 1.3
Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan

Jenis Latihan Jabatan	Jumlah	Persentase
PIM III	-	-
PIM IV	5	26,31%
ADUM	-	-
Tidak Mengikuti	14	73,69%
Total	19	100 %

Sumber: DPKAD

Dari tabel 1.3 di atas dapat dilihat bahwa yang mengikuti pelatihan hanya sebanyak 5 orang atau sebesar 26,31% dari total pegawai bidang akuntansi, sisanya tidak mengikuti pelatihan. Dari data yang diperoleh pun yang mengikuti pelatihan hanya pegawai yang memiliki jabatan tinggi, sedangkan untuk staff masih kurang diberi pelatihan yang cukup.

d. Pengalaman Kerja

Tabel 1.4
Data Pegawai Berdasarkan Pengalaman Kerja Bidang Keuangan

Pengalaman Kerja	Jumlah	Persentase
< 5 tahun	3	15,78%
6 – 10 tahun	6	31,58%
>10 tahun	10	52,64%
Total	19	100 %

Sumber: DPKAD

Dari tabel 1.4 di atas dapat dilihat pegawai yang berpengalaman di bidang keuangan lebih dominan sebanyak 10 orang atau sebesar 52,64%.

Data hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintahan kota Bandung belum sebagaimana yang diharapkan. Hal ini terlihat dari opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diberikan oleh BPK RI pada tahun 2009, BPK memberikan opini tersebut karena ada beberapa jenis informasi pengungkapan dan penyajian dinilai tidak cukup. Sementara laporan keuangan pemerintah daerah kota Bandung untuk tahun 2010 mendapatkan opini wajar dengan pengecualian. Beberapa pengecualian yang dilaporkan oleh BPK adalah sebagai berikut:

1. Nilai asset Pemerintahan Kota Bandung yang belum sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Masih banyak asset Pemerintahan Kota Bandung yang belum dicatat.
2. Terdapat tumpang tindih dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah mengenai kewenangan pajak daerah tertentu.
3. Penyertaan modal Pemerintah Kota Bandung kepada PD Pasar besarnya masih lebih rendah dari besar penyertaan yang diatur oleh peraturan daerah (perda). Hal ini terjadi karena adanya keterbatasan anggaran.
4. Banyak terdapat masalah dalam dana hibah bantuan sosial, dari 80 milyar rupiah dana yang dikeluarkan, 40 milyar tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Hal ini menunjukkan efektivitas sistem pengendalian internal (SPI) pemerintahan daerah belum optimal. Belum optimalnya efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah daerah umumnya meliputi permasalahan kurang tertibnya penyusunan dan penerapan kebijakan dan kurangnya komitmen terhadap kompetensi, belum optimalnya kegiatan identifikasi risiko dan analisis risiko, lemahnya pengendalian fisik atas asset serta pencatatan transaksi yang kurang akurat, dan tepat waktu.

Implementasi sistem pengendalian intern menuntut adanya komitmen dan peran aktif para pimpinan daerah pada setiap level dan tingkatan organisasi, mengingat pemimpin daerah mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peran kepemimpinan daerah pada dasarnya ada di semua tingkatan organisasi yang bersifat sistemik dan institusional. Sistemik artinya terkait dengan banyak orang yang bekerja berdasarkan suatu sistem dan pada suatu tingkatan tertentu dalam hierarki organisasional. Sedangkan institusional artinya melibatkan banyak orang dalam kepemimpinan tersebut dan masing-masing memiliki posisi dalam institusi tersebut. Oleh karena itu kepemimpinan daerah mempunyai keterkaitan yang sangat erat dalam usaha mencapai kinerja daerah. Sehingga pemimpin daerah haruslah memiliki kemampuan untuk menciptakan suatu kerjasama di antara sistem yang ada dalam pemerintahan daerah.

Mempelajari kompetensi sumber daya manusia adalah upaya mempelajari peran SDM dalam organisasi, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk memilih antara kompetensi potensial dari karyawan sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai pola pemilihan karyawan, pola pengalihan tugas, penilaian kinerja, dan pengembangan potensi karyawan (**Muchtar, 2010**).

Pemerintah daerah berkewajiban mempublikasikan informasi berdasarkan laporan keuangan sebagai dasar pengambil keputusan. Dengan demikian, informasi yang dipublikasikan tersebut dapat dimanfaatkan oleh para pemakai. Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat dipahami, dipercaya dan digunakan oleh pemakai informasi tersebut (**Andriani, 2010**).

Kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat yang disebutkan dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (PP No.71 Tahun 2010) terdiri dari: (a) relevan, (b) andal, (c) dapat dibandingkan dan (d) dapat dipahami.

Berdasarkan fenomena yang diuraikan latar belakang penelitian ini menjadi pertimbangan penulis untuk meneliti masalah Sumber Daya Manusia bagian akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui skripsi yang berjudul **“Pengaruh Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian ini, maka penulis merumuskan berbagai permasalahan sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Seberapa besar pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Seberapa besar pengaruh Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal secara bersama sama atau secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat berguna dan memiliki manfaat antara lain :

1. Bagi Penulis
Meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam bidang akuntansi sektor publik yang sesuai dengan teori yang diperoleh dalam perkuliahan dan mewujudkannya dalam bentuk skripsi.
2. Bagi Penulis Lain
Sebagai bahan referensi dan informasi pendukung dalam penelitian selanjutnya, yang diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam.
3. Bagi Bidang ilmu
Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu dan pengayaan lebih mendalam tentang akuntansi sektor publik, terutama mengenai pengaruh sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
4. Bagi Pemerintah
Diharapkan dapat memberikan sumbang saran serta bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung yang beralokasi jalan Wastukencana No.2 Bandung. Sedangkan waktu penelitian ini dilaksanakan mulai bulan juli 2013 sampai dengan bulan September 2013.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (*human resources*) merupakan orang-orang di dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi (**Simamora,2001**). Menurut **Amirudin (2009)**, kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan dari anggota eksekutif maupun legislatif dalam menjalankan fungsi dan perannya masing-masing dalam pengelolaan keuangan daerah.

(**Matindas 2002:89**) Sumber Daya Manusia adalah satu kesatuan tenaga manusia yang dalam organisasi dan bukan hanya sekedar penjumlahan karyawan-karyawan yang ada. Sebagai kesatuan, sumber daya manusia harus dipandang sebagai suatu sistem di mana tiap-tiap karyawan berfungsi untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber daya manusia diukur berdasarkan latar belakang pendidikan yang diperoleh pegawai.

(**Warisno, 2008:48**).Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan

yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah

1. Pendidikan Formal

Pendidikan merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia terutama untuk pengembangan aspek intelektual dan kepribadian manusia. Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas [pendidikan anak usia dini](#), [pendidikan dasar](#), [pendidikan menengah](#), dan [pendidikan tinggi](#). Pendidikan formal dalam organisasi merupakan suatu proses mengembangkan kemampuan ke arah yang diinginkan.

Tingkat pendidikan seringkali menjadi indikator yang menunjukkan derajat intelektualitas seseorang, semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi pengetahuan dan tingkat intelektualitas seseorang. Dengan tingkat pendidikan yang memadai seseorang lebih mudah melaksanakan tugasnya. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik SKPD harus memiliki Sumber Daya Manusia yang kompeten dengan dilatar belakangi pendidikan akuntansi atau keuangan.

2. Pendidikan dan Pelatihan

Program pendidikan dan pelatihan dilakukan untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan pegawai yang sudah dimiliki agar kemampuan pegawai semakin baik. Pendidikan ditekankan pada peningkatan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan pada masa yang akan

datang, yang dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi dengan kegiatan lain untuk mengubah perilaku kerja, sedangkan pelatihan lebih ditekankan pada peningkatan kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang spesifik pada saat ini.

Beberapa tujuan dari program pendidikan dan pelatihan pegawai diantaranya :

1. Meningkatkan produktivitas kerja
2. Meningkatkan kecakapan manajerial pegawai
3. Meningkatkan efisiensi tenaga dan waktu
4. Mengurangi tingkat kesalahan pegawai
5. Meningkatkan pelayanan yang lebih baik dari karyawan untuk konsumen perusahaan dan atau organisasi
6. Menjaga moral pegawai yang baik
7. Meningkatkan karier pegawai

Program pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia memberikan dampak yang baik terhadap kinerja pegawai tersebut sebagai individu. Hal ini jelas akan membawa peningkatan terhadap kinerja organisasi apabila pelatihan dan pengembangan pegawai dilakukan secara terencana dan berkesinambungan. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, program pendidikan dan pelatihan bagi pegawai instansi pemerintah pun cukup penting, karena untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang baik dibutuhkan pegawai yang memahami betul cara dan proses penyusunan laporan keuangan daerah.

3. Pengalaman Kerja

Siagian (2002:62) mengemukakan bahwa pengalaman langsung apabila

seseorang pernah bekerja pada suatu organisasi, lalu oleh karena sesuatu meninggalkan organisasi itu dan pindah ke organisasi yang lain. Sedangkan pengalaman tidak langsung adalah peristiwa yang diamati dan diikuti oleh seseorang pada suatu organisasi meskipun yang bersangkutan sendiri tidak menjadi anggota daripada organisasi di mana peristiwa yang diamati dan diikuti terjadi.

Pengalaman kerja di dalam suatu organisasi pun menjadi salah satu indikator bahwa seseorang telah memiliki kemampuan yang lebih. Semakin lama seorang pegawai bekerja dalam suatu bidang di organisasi, maka semakin banyak pengalaman pegawai tersebut dan semakin memahami apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepada pegawai tersebut.

Begitupun dalam penyusunan laporan keuangan daerah, SKPD diharapkan memiliki sumber daya manusia yang telah memiliki pengalaman kerja yang lebih lama di bidang akuntansi atau keuangan, karena dalam menyusun laporan keuangan dibutuhkan pegawai yang benar-benar memahami akuntansi atau keuangan beserta aturan-aturan dalam penyusunan laporan keuangan daerah.

2.1.1 Sistem Pengendalian Internal

Dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan serta pertanggungjawaban kegiatan Instansi Pemerintah, pimpinan Instansi Pemerintah wajib menerapkan setiap unsur dari Sistem Pengendalian Intern. Untuk memastikan bahwa Sistem Pengendalian Intern tersebut sudah dirancang dan diimplementasikan dengan baik, dan secara memadai diperbaharui untuk memenuhi keadaan yang terus berubah perlu dilakukan pemantauan secara terus-menerus. Pimpinan Instansi Pemerintah

melakukan pemantauan antara lain melalui evaluasi terpisah atas Sistem Pengendalian Internnya masing-masing untuk mengetahui kinerja dan efektifitas Sistem Pengendalian Intern serta cara meningkatkannya. Pemantauan juga berguna untuk mengidentifikasi dan mengatasi risiko utama seperti penggelapan, pemborosan, penyalahgunaan, dan salah-kelola (*mismanagement*).

2.1.1.1 Pengertian Pengendalian Internal

Xu, et al. (2003) menjelaskan bahwa interaksi antara orang dan sistem serta implementasi sistem merupakan faktor penting yang mempengaruhi kualitas dari sebuah informasi. Keandalan sistem harus juga didukung oleh keandalan sumber daya manusia. Namun sistem yang sudah berjalan harus dikontrol agar tetap dapat berjalan baik.

Menurut **Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008** tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah menyatakan bahwa:

“Sistem pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, yang kemudian disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.”

Sistem Pengendalian Internal merupakan kegiatan pengendalian terutama atas pengelolaan sistem informasi yang bertujuan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi. Kegiatan pengendalian atas pengelolaan informasi meliputi Pengendalian Umum dan Pengendalian Aplikasi, yang masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengendalian umum

Pengendalian ini meliputi pengamanan sistem informasi, pengendalian atas akses, pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi, pengendalian atas perangkat lunak sistem, pemisahan tugas, dan kontinuitas pelayanan.

b. Pengendalian aplikasi

Pengendalian ini meliputi pengendalian otorisasi, pengendalian kelengkapan, pengendalian akurasi, dan pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data.

Dalam kaitannya dengan efektivitas penyusunan laporan keuangan maka baik buruknya implementasi sistem pengendalian internal dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.1.1.2 Tujuan Pengendalian Internal

Arens et. Al. (2011) yang dialih bahasakan oleh Herman Wibowo memaparkan tiga tujuan umum manajemen dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif, *yaitu:*

- 1. Reliability Of Financial Reporting.***
- 2. Efficiency and Effectiveness Of Operations***
- 3. Compliance With Laws and Regulations***

Manajemen bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan bagi para investor, kreditor dan pemakai lainnya. Manajemen memikul baik tanggung jawab hukum maupun professional untuk memastikan bahwa informasi telah disajikan secara wajar sesuai dengan persyaratan pelaporan seperti prinsip-prinsip akuntansi

yang berlaku umum. Tujuan pengendalian internal yang efektif atas pelaporan keuangan adalah memenuhi tanggung jawab pelaporan keuangan tersebut.

Pengendalian dalam perusahaan akan mendorong pemakaian sumber daya secara efektif dan efisien untuk mengoptimalkan sasaran-sasaran perusahaan. Tujuan yang penting dari pengendalian ini adalah memperoleh informasi keuangan dan non-keuangan yang akurat tentang operasi perusahaan untuk keperluan pengambilan keputusan. Manajemen harus menguji efektifitas pelaksanaan pengendalian.

Tujuan penggunaan ini adalah untuk menentukan apakah pengendalian telah berjalan seperti yang telah dirancang dan apakah orang yang melaksanakan memiliki kewenangan serta kualifikasi yang diperlukan untuk melaksanakan pengendalian secara efektif.

Organisasi-organisasi publik, non-publik, dan nirlaba diwajibkan menaati berbagai hukum dan peraturan. Beberapa hanya berhubungan secara tidak langsung dengan akuntansi, seperti Undang-Undang perlindungan hukum dan hak sipil, sementara yang lainnya berkaitan erat dengan akuntansi, seperti peraturan pajak penghasilan dan kecurangan.

2.1.1.3 Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Internal

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah menyebutkan bahwa SPIP terdiri dari unsur-unsur berikut:

- 1. Lingkungan pengendalian***
- 2. Penilaian risiko***
- 3. Kegiatan pengendalian***
- 4. Informasi dan komunikasi***
- 5. Pemantauan pengendalian intern***

Adapun penjabaran unsur-unsur pengendalian internal sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian:

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Internal dalam lingkungan kerjanya.

Lingkungan pengendalian terdiri dari:

- a. penegakan integritas dan nilai etika;
- b. komitmen terhadap kompetensi;
- c. kepemimpinan yang kondusif;
- d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif;
- h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2. Penilaian Risiko

Dalam rangka penilaian resiko, pimpinan Instansi Pemerintah dapat menetapkan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Penilaian resiko terdiri dari:

- a. Penetapan tujuan instansi secara keseluruhan
- b. Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan
- c. Identifikasi risiko

- d. Analisis risiko
- e. Mengelola risiko selama perubahan

3. Kegiatan Pengendalian

Pimpinan Instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dari sifat dan tugas dan fungsi yang bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian terdiri dari:

- a. reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
- b. pembinaan sumber daya manusia;
- c. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
- d. pengendalian fisik atas aset;
- e. penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
- f. pemisahan fungsi;
- g. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
- h. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
- i. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
- j. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
- k. dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

4. Informasi dan Komunikasi

Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif.

- a. Informasi

- b. Komunikasi
 - c. Bentuk dan sarana komunikasi
5. Pemantauan pengendalian intern
- Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Internal melalui:
- a. Pemantauan berkelanjutan
 - b. Evaluasi terpisah
 - c. Penyelesaian audit

2.1.1.4 Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2002:182) terdapat pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengendalian internal organisasi, diantaranya adalah:

- 1. Manajemen**
- 2. Dewan Komisaris dan Komite Audit**
- 3. Auditor Intern**
- 4. Personal Lain Entitas**
- 5. Auditor independen**

Manajemen bertanggungjawab untuk mengembangkan dan menyelenggarakan secara efektif pengendalian intern organisasinya. Direktur utama perusahaan bertanggungjawab untuk menciptakan atmosfer pengendalian di tingkat puncak, agar kesadaran terhadap pentingnya pengendalian menjadi tumbuh di seluruh organisasi.

Dewan komisaris bertanggungjawab untuk menentukan apakah manajemen bertanggung jawab dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian intern.

Auditor intern bertanggung jawab untuk memeriksa dan mengevaluasi memadai atau tidaknya pengendalian intern entitas dan membuat rekomendasi peningkatannya.

Peran dan tanggung jawab semua personel lain yang menyediakan informasi atau yang menggunakan informasi yang dihasilkan oleh pengendalian intern harus ditetapkan dan dikomunikasikan dengan baik.

Sebagai bagian dari prosedur auditnya terhadap laporan keuangan, auditor dapat menemukan kelemahan pengendalian intern kliennya, sehingga ia dapat mengkomunikasikan temuan auditnya tersebut kepada manajemen, komite audit, atau dewan komisaris. Berdasarkan temuan auditor tersebut, manajemen dapat melakukan peningkatan pengendalian intern entitas.

2.1.2 Laporan Keuangan Daerah

2.1.2.1 Pengertian Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas yang jelas.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang

termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 4 dikatakan pula bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan maanfaat untuk masyarakat.

Menurut **Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010** pengertian laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.”

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, yang terdiri dari:

- a. Pemerintah pusat;
- b. Pemerintah daerah
- c. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Menurut **Bastian (2006: 96)** pengertian laporan keuangan adalah:

“Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi

keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas Sektor Publik.”

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan tertulis yang memberikan informasi kuantitatif tentang posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

2.1.2.2 Komponen Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006**, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran**
- b. Neraca**
- c. Laporan Arus Kas**
- d. Catatan Atas Laporan Keuangan**

Adapun penjelasannya seperti berikut:

- a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan, belanja transfer dan pembiayaan.

- b. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari:

- a) Aset;**
- b) Kewajiban; dan**
- c) Ekuitas dana.**

Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- a) Aset adalah sumber ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- c) Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

c. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, inventaris aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang mencakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

- a) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah.
- b) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/daerah.

d. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk mengungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintah serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Selain keempat komponen laporan keuangan di atas, berdasarkan **Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010** tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) mengatakan bahwa entitas pelaporan diperkenankan menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas, yang

masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

a. Laporan Kinerja Keuangan

Laporan kinerja keuangan adalah laporan realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual. Dalam laporan dimaksud, perlu disajikan informasi mengenai pendapatan operasional, belanja berdasarkan klasifikasi fungsional dan ekonomi, dan surplus atau defisit. Laporan Kinerja Keuangan sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- a) **Pendapatan dari kegiatan operasional;**
- b) **Beban berdasarkan klasifikasi fungsional dan klasifikasi ekonomi;**
- c) **Surplus atau defisit.**

b. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Suatu entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Perubahan Ekuitas maka menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- a) sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran;
- b) setiap pos pendapatan dan belanja beserta totalnya seperti diisyaratkan dalam standar-standar lainnya, yang diakui secara langsung dalam ekuitas;
- c) efek kumulatif atas perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang mendasar diatur dalam suatu standar terpisah.

2.1.2.3 Kualitas Laporan Keuangan

Dalam memenuhi keinginan pemakai laporan, akuntansi keuangan perlu

berupaya untuk membentuk dirinya agar lebih bermanfaat dan berdaya guna. Oleh karena itu perlu kriteria persyaratan laporan akuntansi keuangan yang dianggap dapat memenuhi keinginan tersebut yaitu keinginan para pemakai laporan keuangan (**Harahap, 2008: 145**).

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut **Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010** tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah sebagai berikut:

“Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.”

Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

- a. Relevan**
- b. Andal**
- c. Dapat dibandingkan**
- d. Dapat dipahami**

Berikut penjelasan mengenai karakteristik kualitatif laporan keuangan:

- a. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa

lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan:

a) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

b) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c) Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d) Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

a) Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b) Dapat Diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c) Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

c. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dilakukan dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

d. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh

pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan guna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.2 Kerangka Pemikiran

Indonesia memasuki era pemerintahan daerah yang baru, maksudnya setiap daerah diberi kewenangan untuk menjelaskan berdasarkan PAD. perubahan yang cukup fundamental terjadi di dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan konsep otonomi daerah yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Hal ini tentunya membawa perubahan juga terhadap pengelola keuangan Negara sehubungan dengan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah mengatur sendiri mengenai pengelolaan keuangan daerahnya.

Dalam pengelolaan keuangan, pemerintah melakukan reformasi dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mesyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Tujuan diberlakukannya hal tersebut adalah agar lebih *accountable* dan semakin diperlukannya peningkatan kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan pemerintah sangat dipengaruhi oleh faktor kepatuhan terhadap standar akuntansi, kapabilitas sumber daya manusia, serta dukungan sistem akuntansi yang ada.

(**Badjuri dan Trihapsari, 2004**). Tujuan penting reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik adalah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Akuntabilitas dan transparansi tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah yang dilakukan aparatur pemerintah berjalan dengan baik.

Bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran adalah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

(**Andriani, 2010**). Pemerintah daerah berkewajiban mempublikasikan informasi berdasarkan laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian, informasi yang dipublikasikan tersebut dapat dimanfaatkan oleh para pemakai. Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat dipahami, dipercaya dan digunakan oleh pemakai informasi tersebut.

Agar informasi akuntansi yang dihasilkan dapat digunakan dengan baik oleh pemakai, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terdapat kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah berkualitas, yang terdiri dari: (a) relevan, (b) andal, (c) dapat dibandingkan dan (d) dapat dipahami.

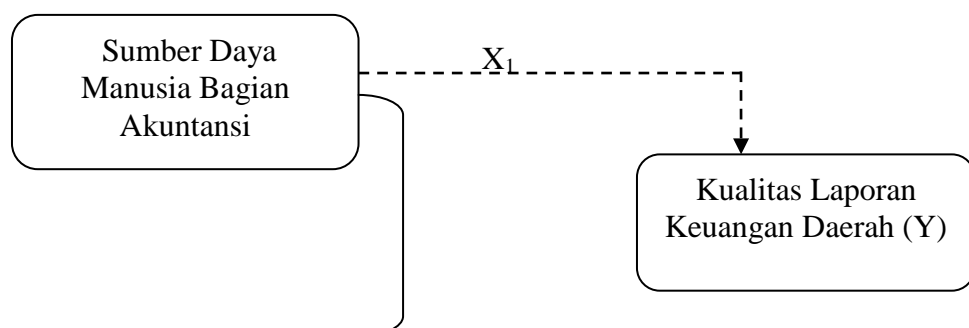
Selain sumber daya manusia, hal lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah pengendalian internal. Pengendalian intern pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

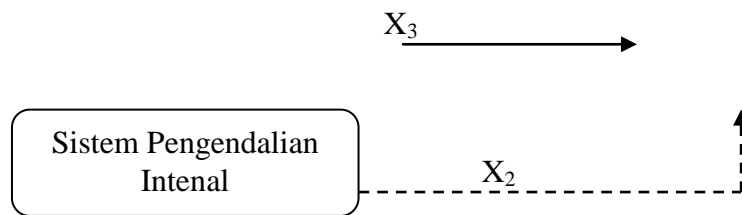
Penelitian yang dilakukan oleh **Choirunisah (2008)**, meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan sistem akuntansi instansi studi pada KPPN Malang. Hasil penelitiannya menyatakan kemampuan sumber daya manusia dan organisasi tim berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi keuangan satuan kerja.

Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) meneliti pengaruh sumber daya manusia dan informasi teknologi pemanfaatan keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening pengendalian internal akuntansi. Hasil penelitiannya menyatakan sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, tetapi tidak signifikan terhadap ketepatan waktu. Pemanfaatan TI berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan ketepatan waktu.

Indriasari dan Nahartyo (2008) meneliti tentang Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (studi pada pemerintah Kota Palembang dan kabupaten Ogan Ilir). Hasilnya menunjukkan bahwa Kapasitas sumber daya manusia tidak mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, tetapi berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah secara signifikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh hubungan antara variabel terikat yaitu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan variabel bebas yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal. Kerangka pemikiran yang digunakan untuk merumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:





Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut **Sekaran (2007:135)**, hipotesis dapat didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua variabel yang diungkapkan dalam bentuk pertanyaan secara logis.

Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- H₁ : Adanya pengaruh positif dari Sumber Daya Manusia Bagian Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung.
- H₂ : Adanya pengaruh positif dari Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung.
- H₃ : Adanya pengaruh positif dari Sumber Daya Manusia Bagian Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung.

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

(Arikunto, 2002:37). Objek penelitian adalah variabel atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penulisan, sedangkan subjek penelitian adalah tempat dimana variabel melekat. Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah pengaruh Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bandung.

3.1.1 Sejarah Singkat Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia merupakan suatu strategi yang memiliki tujuan untuk merespons tuntutan masyarakat terhadap tiga permasalahan utama, yaitu *sharing of power*, *distribution of income* dan kemandirian sistem manajemen di daerah. Otonomi daerah juga merupakan suatu strategi untuk memperkuat perekonomian daerah dalam rangka memperkuat perekonomian nasional.

Pelaksanaan otonomi daerah diikuti dengan serangkaian reformasi di sektor publik, salah satunya adalah reformasi manajemen publik (*public management reform*) yang berorientasi pada kinerja. Lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sejalan dengan reformasi manajemen publik yang menimbulkan beberapa konsekuensi diantaranya adalah

perubahan pendekatan dalam penganggaran dari penganggaran tradisional (*traditional budget*) menjadi penganggaran berbasis kinerja (*performance budget*).

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pelaksanaan pengelolaan keuangan negara masih menggunakan ketentuan perundang-undangan yang disusun pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang berlaku berdasarkan Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Indische Comptabiliteitswet yang lebih dikenal dengan nama ICW Stbl. 1925 No. 448 selanjutnya diubah dan diundangkan dalam Lembaran Negara 1954 Nomor 6, 1955 Nomor 49, dan terakhir Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968, yang ditetapkan pertama kali pada tahun 1864 dan mulai berlaku pada tahun 1867, Indische Bedrijvenwet (IBW) Stbl. 1927 No. 419 jo. Stbl. 1936 No. 445 dan Reglement voor het Administratief Beheer (RAB) Stbl. 1933 No. 381. Sementara itu, dalam pelaksanaan pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan negara digunakan Instructie en verdere bepalingen voor de Algemeene Rekenkamer (IAR) Stbl. 1933 No. 320. Peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat mengakomodasi lagi berbagai perkembangan yang terjadi dalam sistem kelembagaan negara dan pengelolaan keuangan pemerintahan negara Republik Indonesia.

Reformasi manajemen publik ditindaklanjuti dengan serangkaian reformasi lanjutan terutama yang terkait dengan sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah, diantaranya reformasi sistem pembiayaan, reformasi sistem penganggaran, reformasi sistem akuntansi dan reformasi sistem manajemen keuangan daerah. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan uang

rakyat (*public money*) dilakukan secara transparan sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*).

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung merupakan dinas daerah yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota Bandung, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung.

3.1.2 Visi dan Misi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung

1. Visi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung sebagai berikut :

"Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel dalam Mendukung Pemanfaatan Kota Bandung sebagai Kota Jasa Bermartabat"

2. Misi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya. Misi adalah tindakan nyata yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal organisasi dan

mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang. Sejalan dengan hal tersebut, maka Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung merumuskan pernyataan misi sebagai berikut:

1. Misi pertama, mewujudkan anggaran daerah yang berbasis kinerja dan tepat waktu.
2. Misi kedua, mewujudkan penatausahaan keuangan dan aset yang tertib.
3. Misi ketiga, mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel.

3.1.3 Struktur Organisasi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri atas :

- | | | |
|-----------|---|----------------------|
| a. | Kepala | Dinas |
| b. | Sekretariat, | membawahkan : |
| 1) | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; | |
| 2) | Sub Bagian Keuangan dan Program; | |
| c. | Bidang Anggaran, | membawahkan : |
| 1) | Seksi Anggaran Pendapatan; | |
| 2) | Seksi Anggaran Belanja, Pembiayaan dan Investasi; | |
| d. | Bidang Perbendaharaan, | membawahkan : |

- 1) Seksi Belanja Tidak Langsung;
- 2) Seksi Belanja Langsung;
- 3) Seksi Pembiayaan dan Manajemen Kas;

e. Bidang Pemberdayaan Aset, membawahkan :

- 1) Seksi Sertifikasi, Mutasi dan Dokumentasi;
- 2) Seksi Pemanfaatan Aset Daerah;
- 3) Seksi Pengamanan dan Penanganan Sengketa;

f. Bidang Akuntansi, membawahkan :

- 1) Seksi Akuntansi Pendapatan dan Pembiayaan;
- 2) Seksi Akuntansi Belanja;
- 3) Seksi Pencatatan dan Pelaporan.

3.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelola Keuangan daerah Kota Bandung

3.1.5.1 Tugas Pokok Dinas Pengelola Keuangan daerah Kota Bandung

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, tugas pokok Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah.

3.1.5.1.2 Fungsi Dinas Pengelola Keuangan daerah Kota Bandung

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis operasional bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Pelaksanaan tugas teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi anggaran, perbendaharaan, pemberdayaan aset dan akuntansi;
- c. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif dinas;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan pengertian populasi dan sampel tersebut maka yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah seluruh pegawai Bidang Akuntansi yang bekerja di Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan survey. Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya (**Sugiyono, 2012:29**). Metode verifikatif adalah menguji kebenaran dari suatu hipotesis yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan (**Arikunto, 2002:86**). Survey

statistik adalah suatu proses pengumpulan data primer dengan menanyai responden untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan (**Hakim, 2010:26**).

Karena penelitian ini dilakukan pada satu organisasi saja dan masalah yang diteliti bersifat khusus, maka metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Dalam hal ini, penulis mengamati aspek-aspek tertentu yang lebih spesifik untuk memperoleh data primer maupun data sekunder.

3.2.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara atau jalan yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Data dalam penelitian dilakukan dengan cara :

1. Penelitian lapangan :

- a) Observasi

Merupakan pengumpulan data dan informasi melalui pengamatan langsung guna mendapatkan data obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

- b) Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab sehingga dapat

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (**sugiyono 2011:231**).

c) Kuisisioner

Pengumpulan data primer dari responden. Pada penelitian ini responden yang dipilih untuk diwawancarai adalah seluruh pegawai bidang akuntansi yang bekerja di Dinas Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah Kota Bandung. Menurut **Riduwan (2002:25)** mengatakan bahwa “angket (*Questionnaire*) adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain yang bersedia memberikan repons (*responden*) sesuai dengan permintaan pengguna”.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan kuesioner tertutup yaitu angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden tinggal memberikan tanda centang (V) pada kolom atau tempat yang sesuai. Menurut **Riduwan (2002:2)** “Kelebihan dari model tertutup adalah mudah memberikan nilai, gampang pemberian kode dan responden tidak perlu menulis”.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan kuesioner tertutup yaitu angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden tinggal memberikan tanda centang (V) pada kolom atau tempat yang sesuai. Menurut **Riduwan (2002:2)** “Kelebihan dari model tertutup adalah mudah memberikan nilai, gampang pemberian kode dan responden tidak perlu menulis”.

Tabel 3.1
Pemberian Skor Jawaban Skala Likert

Alternatif Jawaban	Penilaian
---------------------------	------------------

	Positif	Negatif
Sangat Setuju (SS)	5	1
Setuju (S)	4	2
Ragu-ragu (RR)	3	3
Tidak Setuju (TS)	2	4
Sangat Tidak Setuju (STS)	1	5

Sumber: Sugiyono

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu penelitian sebagai usaha untuk memperoleh keterangan dan data dengan membaca dan mempelajari bahan-bahan teoritis dari buku-buku litelatur, catatan kuliah serta sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, agar diperoleh suatu pemahaman yang mendalam serta menunjang proses pembahasan mengenai masalah-masalah yang diidentifikasi.

3.2.1 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Dalam penelitian terdapat variabel-variabel yang akan diteliti yang bersifat saling mempengaruhi. Variabel-variabel ini dapat juga disebut sebagai objek penelitian. Variabel dapat diartikan sebagai sesuatu yang dijadikan objek penelitian sebagai faktor –faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti.

Operasional variabel adalah kegiatan atau proses yang dilakukan peneliti untuk mengurangi tingkat abstraksi konsep sehingga konsep tersebut dapat diukur (Zulganef, 2008:84). Sedangkan menurut Arikunto (2006:96) mengatakan

bahwa “Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian”.

Menurut **Sekaran (2006)**, mengoperasionalkan atau secara operasional mendefinisikan sebuah konsep untuk membuatnya bisa diukur, dilakukan dengan melihat pada dimensi perilaku, atau sifat yang ditunjukkan oleh konsep. Hal tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam elemen yang dapat diamati dan diukur sehingga menghasilkan suatu indeks pengukuran konsep.

Tabel 3.2
Operasionalisasi Variabel, Dimensi, Indikator, Skala pengukuran, dan Instrument

Operasional Variabel	Dimensi	Indikator	Skala	Instrument
Sumber Daya Manusia (X ₁)	1. Kompetensi	1. Keuangan atau non-keuangan	Ordinal	kuisisioner
		2. Bidang pendidikan		
		3. Tingkat pendidikan		
		4. Masa kerja		
	2. Pendidikan dan Pelatihan	1. Sering mengadakan diklat		
		2. Jumlah peserta diklat		
		3. Hasil diklat		
	3. Pengalaman di bidang keuangan	1. Memahami teori keuangan		
		2. Memahami aturan pembuatan laporan keuangan		
Sistem Pengendalian Internal (X ₂)	1. Lingkungan Pengendalian	1. Penekanan integritas dan nilai etika	Ordinal	kuisisioner
		2. Komitmen terhadap kompetensi		
		3. Kepemimpinan yang kondusif		
		4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan		
		5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat		
		6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang		

		sehat tentang pembinaan sumber daya manusia		
		7.Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif		
		8.Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait		
	2. Penilaian resiko	1.Penerapan tujuan instansi secara keseluruhan		
		2.Penerapan tujuan pada tingkatan kegiatan		
		3.Identifikasi resiko		
		4.Analisis risiko		
		5.Mengelola risiko selama perubahan		
	3. Kegiatan Pengendalian	1. reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan		
		2.Pembinaan sumber daya manusia		
		3.Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi		
		4.Pengendalian fisik atas asset		
		5.Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja		
		6. pemisahan fungsi		
		7. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting		
		8. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian		
		9. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya		
		10. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya		
		11. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting		
	4.Informasi dan Komunikasi	1. Informasi		
		2.Komunikasi		
		3.Bentuk dan sarana komunikasi		
	5.Pemantauan	1. Pemantauan berkelanjutan		
		2.Evaluasi terpisah		
		3.Penyelesaian audit		
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	1. Relevan	1. Memiliki manfaat umpan balik	Ordinal	kuisisioner
		2. Memiliki manfaat prediktif		
		3. Tepat waktu		
		4. Lengkap		
	2. Andal	1. Penyajian jujur		
		2. Dapat diverifikasikan		
		3. Netral		

	3. Dapat dibandingkan	1. Konsistensi		
		2. Dapat dibandingkan		
	4. Dapat dipahami	1. Dapat dipahami		

3.3 Metode Analisis Data

3.3.1. Analisis Statistik dan Pengujian Hipotesis

Analisis statistik yang digunakan untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda dengan terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji secara simultan dan parsial. Kemudian penarikan kesimpulan dilaksanakan berdasarkan hasil pengolahan data dan hasil pengujian hipotesis.

3.3.2 Uji Kualitas Data

Sebelum menggunakan instrumen terlebih dahulu dilakukan uji coba untuk mendapatkan butir pernyataan yang valid dan handal, maka dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas.

3.3.2.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner sebagai instrumen penelitian dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2005). Untuk menguji validitas dari item kuesioner digunakan rumus korelasi *rank spearman*. Korelasi *rank spearman*

digunakan apabila sumber data untuk kedua variabel yang akan dikonversikan dapat berasal dari sumber yang tidak sama, jenis data berupa data ordinal (Sugiyono, 2012:244). Uji validitas ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor total yang dihasilkan oleh masing-masing responden dengan skor masing-masing item, dengan rumus:

$$p = 1 - \frac{6 \sum b_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

Sumber: (Sugiono 2012:245)

Instrumen dapat dinyatakan valid apabila hasil perhitungan koefisien korelasi menunjukkan koefisien korelasi sebesar 0,3 atau lebih (Sugiyono, 2004). Instrumen penelitian juga dapat dinyatakan valid apabila mempunyai nilai r hitung lebih besar dari r tabel pada taraf signifikan 5%. Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan program SPSS for windows versi 20.0.

3.3.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas data digunakan untuk menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran telah konsisten apabila dilakukan dua kali atau lebih dari gejala yang sama (Sekaran, 2006). Uji ini hanya dilakukan pada item pernyataan yang dinyatakan valid dalam uji validitas. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan teknik *Cronbach's Alpha*, yaitu dengan bantuan program SPSS for windows versi 20.0.

Adapun rumus statistik yang digunakan yaitu:

$$r = \left[\frac{k}{k-1} \right] \left[1 - \frac{\sum Si^2}{Si^2} \right]$$

Di mana :

r = koefisien reliabilitas

k = banyaknya jumlah item

$\sum Si^2$ = Jumlah varians skor item

Si^2 = varians skor total

Menurut **Sekaran (2006)**, instrumen dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,70. Semakin tinggi koefisien alpha, berarti semakin baik pengukuran suatu instrumen. Semakin dekat koefisien alpha pada nilai 1 berarti butir-butir pernyataan dalam koefisien semakin reliabel.

3.3.3 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi linier berganda, terdapat beberapa uji asumsi klasik yang terlebih dahulu harus dipenuhi. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas data, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

3.3.3.1 Uji Normalitas Data

Uji normalitas data dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu (residual) memiliki distribusi normal atau tidak (**Ghozali, 2005**). Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Dimana dalam penelitian ini digunakan metode *Kolmogorov-Smirnov* yang dilakukan dengan bantuan *software* SPSS 20.0. Pengambilan keputusan pada pengujian ini dilakukan sebagai berikut:

- *Asymp. Sig* < 0.05 = Distribusi Tidak Normal
- *Asymp. Sig* > 0.05 = Distribusi Normal

Cara untuk mendeteksi normalitas adalah dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut :

1. Jika data (titik) menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data (titik) menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

3.3.3.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol (**Ghozali, 2006: 911**). Model regresi yang baik seharusnya adalah yang tidak terjadi korelasi di antara variabel-variabel bebas. Cara untuk mendeteksi adanya multikolinieritas adalah dengan cara melihat tabel VIF (*Variance Inflation Factor*). Jika nilai VIF lebih dari 10 maka ada indikasi adanya multikolinieritas yang sebenarnya perlu dihindari.

3.3.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastis dan jika berbeda disebut heteroskedastis. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas.

Cara untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Deteksi ada tidaknya heteroskedastis dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$) yang telah di *studentized*. Dengan dasar analisis sebagai berikut:

- a) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu dan teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan terjadinya heteroskedastis.
- b) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastis.

3.3.3.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi digunakan untuk meramalkan atau memperkirakan nilai dari satu variabel dalam hubungannya dengan variabel yang lain yang diketahui melalui persamaan garis regresinya. Sedangkan, regresi linear berganda adalah regresi dimana variabel terikatnya (Y) dihubungkan atau dijelaskan dengan lebih dari satu variabel bebas tetapi masih menunjukkan diagram hubungan yang linear. Untuk mempermudah melakukan perhitungan secara statistik, maka semua analisis yang dilakukan dalam penelitian ini akan diolah dengan bantuan program SPSS 20.0 *for windows*. Berikut ini merupakan model regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini:

$$\hat{Y} = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Di mana:

Y = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

a = Konstanta

b₁ = Koefisien Regresi Kompetensi Sumber Daya Manusia

b₂ = Koefisien Regresi Sistem Pengendalian Internal

X₁ = Kompetensi Sumber Daya Manusia

X₂ = Sistem Pengendalian Internal

e = Kesalahan (error)/ tingkat pengganggu

3.3.3.5 Analisis Koefisien Korelasi

Untuk menentukan hubungan antara kedua variabel yang ada, yaitu variabel independen (kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal) dan variabel dependen (kualitas laporan keuangan pemerintah daerah), maka dilakukan uji korelasi *Pearson*.

Rumus Korelasi *Pearson Product Moment* :

$$r_{YX_j} = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\left[n\sum X^2 - (\sum X)^2 \right] \left[n\sum Y^2 - (\sum Y)^2 \right]}}$$

Keterangan :

r = Koefisien korelasi *Pearson* antara item dengan variabel yang bersangkutan

X = Skor Item dalam variabel

Y = Skor semua item dalam variabel

N = Jumlah responden

Tabel 3.3
Tingkat Hubungan Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono (2012:231)

3.3.3.6 Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Koefisien determinasi ini digunakan karena dapat menjelaskan kebaikan dari model regresi dalam memprediksi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi terletak antara nol dan satu ($0 < R^2 < 1$). Nilai R^2 yang mendekati 0 menunjukkan kemampuan variabel independen sangat terbatas dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai

R^2 yang mendekati 1 menunjukkan semakin besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2005).

Hasil koefisien determinasi ini dapat dilihat dari perhitungan dengan program Microsoft/SPSS 20.0 atau secara manual didapat dari $R^2 = SS_{reg}/SS_{tot}$, dengan rumus koefisien determinasi adalah :

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Di mana :

Kd = koefisien determinasi

r = koefisien korelasi

3.3.3.7 Penarikan Kesimpulan

Dari hipotesis-hipotesis yang penulis kemukakan, dapat ditarik kesimpulan apakah variabel independen secara simultan maupun parsial memiliki pengaruh positif atau tidak terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini penulis memperoleh data hasil kuesioner mengenai Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yang kemudian akan diolah menggunakan perhitungan statistik dengan tujuan untuk mendapatkan hasil akhir yaitu pengambilan kesimpulan dari hipotesis yang telah diajukan.

4.1.1 Sumber Daya Manusia

Variabel sumber daya manusia terdiri dari 15 butir pernyataan yang terbagi menjadi 3 dimensi yaitu: dimensi latar belakang pendidikan, pendidikan dan pelatihan, dan pengalaman di bidang akuntansi. Menurut Warisno (2008) untuk membuat LKPD yang baik maka SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten. Berikut disajikan kecenderungan jawaban responden variabel sumber daya manusia dengan pendekatan distribusi frekuensi dan persentase.

a. Dimensi Latar Belakang Pendidikan

Berikut disajikan skor tanggapan responden untuk dimensi kompeten yang terdiri dari 4 pernyataan dengan pendekatan distribusi frekuensi dan persentase.

Tabel 4.1
Rekapitulasi Jawaban Responden Terhadap Dimensi Latar Belakang

No	Pernyataan	Skor Jawaban Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	%
		SS	S	RR	TS	STS			
1	Sebagian besar pegawai yang bekerja di DPKAD berlatar belakang pendidikan keuangan.	f	2	12	5	0	73	95	76.84
		%	10.5	63.2	26.3	0			
2	Sebagian besar bidang pendidikan terakhir pegawai di DPKAD yaitu: SS = Akuntansi/keuangan S = Perbankan RR = Ilmu Pemerintahan TS = Manajemen STS = Sejarah	f	1	2	11	5	56	95	58.95
		%	5.3	10.5	57.9	26.3			
3	Sebagian besar tingkat pendidikan terakhir pegawai di DPKAD yaitu: SS = S3 S = S2 RR = S1 TS = D3 STS = SMA	f	0	4	7	8	53	95	55.79
		%	0	21.1	36.8	42.1			
4	Sebagian besar pegawai di DPKAD memiliki masa kerja yaitu: SS = > 20 tahun S = 16 – 20 tahun RR = 11 – 15 tahun TS = 6 – 10 tahun STS = < 5 tahun	f	0	2	9	8	51	95	53.68
		%	0	10.5	47.4	42.1			
Total Skor						233	380	61,31%	
Kategori						Cukup Baik			

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer

Pada tabel 4.1 di atas, terlihat bahwa persentase total skor yang diperoleh dari seluruh pernyataan yang membentuk dimensi latar belakang pendidikan adalah sebesar 61,31% dan termasuk dalam kategori cukup baik.

b. Dimensi Pendidikan dan Pelatihan

Berikut di sajikan skor tanggapan responden terhadap dimensi pendidikan dan pelatihan yang terdiri dari 9 pernyataan dengan pendekatan distribusi frekuensi dan persentase.

Tabel 4.2

Rekapitulasi Jawaban Responden Terhadap Dimensi Pendidikan dan Pelatihan

No	Pernyataan		Skor Jawaban Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	%
			SS	S	RR	TS	STS			
5	DPKAD sering mengadakan program pendidikan dan pelatihan bagi pegawai untuk pengembangan pegawai.	f	0	9	9	1	0	65	95	68.42
		%	0	47.4	47.4	5.3	0			
6	Sebanyak lebih dari 75% pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keuangan yang diadakan oleh DPKAD.	f	0	3	9	7	0	53	95	55.79
		%	0	15.8	47.4	36.8	0			
7	Setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan keuangan, produktivitas kerja pegawai DPKAD meningkat.	f	0	11	8	0	0	68	95	71.58
		%	0	57.9	42.1	0	0			
8	Setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan keuangan, kecakapan manajerial pegawai DPKAD meningkat.	f	2	10	7	0	0	71	95	74.74
		%	10.5	52.6	36.8	0	0			
9	Setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan keuangan, efisiensi tenaga dan waktu meningkat.	f	0	6	11	2	0	61	95	64.21
		%	0	31.6	57.9	10.5	0			
10	Setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan keuangan, tingkat kesalahan pegawai menurun	f	0	14	3	2	0	69	95	72.63
		%	0	73.7	15.8	10.5	0			
11	Setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan keuangan, pelayanan dari pegawai DPKAD untuk instansi pemerintah DPKAD meningkat.	f	0	9	7	3	0	63	95	66.32
		%	0	47.4	36.8	15.8	0			

12	Setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan keuangan, pegawai DPKAD dapat menjaga moral dengan baik.	f	0	13	6	0	0	70	95	73.68
		%	0	68.4	31.6	0	0			
13	Setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan keuangan, karier pegawai DPKAD meningkat.	f	1	17	1	0	0	76	95	80.00
		%	5.3	89.5	5.3	0	0			
Total Skor								596	855	69,70
Kategori								Baik		

Sumber: Hasil Pengolahan data Primer

Pada tabel 4.2 di atas, diperoleh informasi bahwa persentase yang diperoleh dari seluruh pernyataan yang membentuk dimensi pendidikan dan pelatihan adalah sebesar 69,70 % dan termasuk dalam kategori baik.

c. Dimensi Pengalaman di Bidang Akuntansi

Berikut disajikan skor tanggapan responden terhadap dimensi pengalaman di bidang akuntansi yang terdiri dari 2 pernyataan dengan pendekatan distribusi frekuensi dan persentase.

Tabel 4.3

Rekapitulasi Jawaban Responden Terhadap Dimensi Pengalaman di Bidang Akuntansi

No	Pernyataan	Skor Jawaban Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	%
		SS	S	RR	TS	STS			

14	Pegawai yang bekerja di DPKAD khususnya di bidang akuntansi telah memahami teori-teori yang berkaitan dengan keuangan.	f	1	13	5	0	0	72	95	75.79
		%	5.3	68.4	26.3	0	0			
15	Pegawai DPKAD telah memahami aturan-aturan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai aturan yang berlaku (PP 70 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah).	f	3	9	7	0	0	72	95	75.79
		%	15.8	47.4	36.8	0	0			
Total Skor								144	190	75,79
Kategori								Baik		

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer

Pada tabel 4.3 di atas, dapat dilihat bahwa persentase total skor yang diperoleh dari seluruh pernyataan yang membentuk dimensi pengalaman di bidang akuntansi adalah sebesar 75,79% dan termasuk dalam kategori baik.

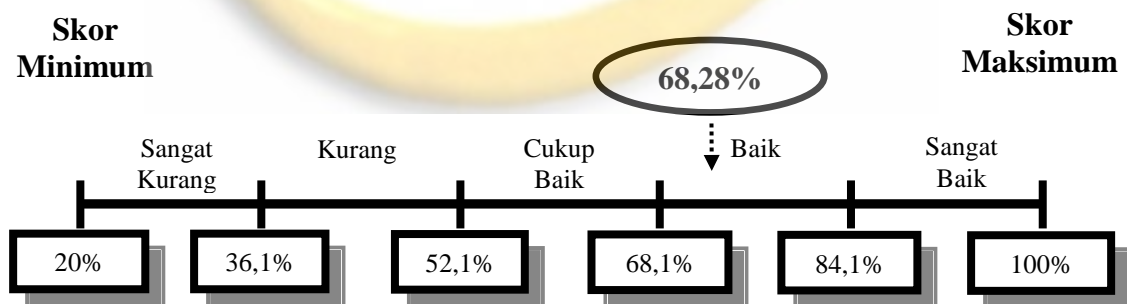
Tabel 4.4
Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Variabel Sumber Daya
Manusia (X₁)

No	Dimensi	Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase (%)	Kategori
1	Latar Belakang Pendidikan	233	380	61,31%	Cukup Baik
2	Pendidikan dan Pelatihan	596	855	69,7%	Baik
3	Pengalaman di Bidang Akuntansi	144	190	75,79%	Baik
Skor Total		973	1425	68,28%	Baik

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer

Pada tabel 4.4 di atas, diketahui bahwa skor aktual yang diperoleh dari seluruh pertanyaan-pertanyaan yang membentuk variabel Sumber daya manusia adalah sebesar 973 dan skor ideal sebesar 1425 dengan nilai persentase yang diperoleh sebesar 68,28%. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia di Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Jalan Wastukencana No.2 Bandung termasuk dalam kategori baik. Kategori baik jika digambarkan dengan menggunakan garis kontinum maka hasilnya akan tampak sebagai berikut.

Gambar 4.1
Garis Kontinum Variabel Sumber Daya Manusia (X1)



4.1.2 Sistem Pengendalian Internal

Variabel Sistem Pengendalian Internal terdiri dari 30 butir pernyataan. Arens et al (2006) mengatakan bahwa tujuan sistem pengendalian internal dibagi menjadi 5, yaitu: lingkungan pengendalian, penaksiran resiko,

aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan yang kemudian dijadikan dimensi untuk variabel sistem pengendalian internal. Berikut disajikan kecenderungan jawaban responden variabel Sistem Pengendalian Internal dengan pendekatan distribusi frekuensi dan persentase.

a. Dimensi Lingkungan Pengendalian

Berikut disajikan skor tanggapan responden terhadap dimensi lingkungan pengendalian yang terdiri dari 8 pernyataan dengan pendekatan distribusi frekuensi dan persentase.

Tabel 4.5
Rekapitulasi Jawaban Responden Terhadap Dimensi Lingkungan Pengendalian

NO	Pertanyaan		Skor Jawaban Responden					Skor Aktua l	Skor Ideal	(%)
			SS	S	RR	TS	ST S			
1	Penekanan integritas dan nilai etika	f	6	8	4	1	0	76	95	80.0 0
		%	31. 6	42. 1	21. 1	5.3	0			
2	Komitmen terhadap kompetensi	f	6	10	3	0	0	79	95	83.1 6
		%	31. 6	52. 6	15. 8	.0	0			
3	Kepemimpinan yang kondusif	f	5	11	2	1	0	77	95	81.0 5
		%	26. 3	57. 9	10. 5	5.3	0			
4	Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan	f	2	2	6	9	0	54	95	56.8 4
		%	10. 5	10. 5	31. 6	47. 4	0			
5	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat	f	10	3	6	0	0	80	95	84.2 1
		%	52. 6	15. 8	31. 6	0	0			
6	Penyusunan	f	5	3	5	6	0	64	95	67.3

	dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia	%	26.3	15.8	26.3	31.6	0			7
7	Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif	f	3	4	4	8	0	59	95	62.11
		%	15.8	21.1	21.1	42.1	0			
8	Hubungan kerja yang baik dengan Instansi pemerintah terkait	f	4	8	7	0	0	73	95	76.84
		%	21.1	42.1	36.8	0	0			
Total Skor								562	760	73.9
Kategori								BAIK		

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer

Pada tabel 4.5 di atas, diketahui bahwa persentase total skor yang diperoleh dari seluruh pernyataan yang membentuk dimensi Lingkungan Pengendalian adalah sebesar 73,9% dan termasuk dalam kategori baik.

b. Dimensi Penilaian Resiko

Berikut disajikan skor tanggapan responden terhadap dimensi penilaian resiko yang terdiri dari 5 butir pertanyaan dengan pendekatan distribusi frekuensi dan persentase.

Tabel 4.6

Rekapitulasi Jawaban Responden Terhadap Dimensi Penilaian Resiko

NO	Pertanyaan	Skor Jawaban Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	(%)
		SS	S	RR	TS	ST S			

9	Penerapan tujuan instansi secara keseluruhan	f	1	18	0	0	0	77	95	81.05
		%	5.3	94.7	0	0	0			
10	Penerapan tujuan pada tingkatan kegiatan	f	5	11	2	1	0	77	95	81.05
		%	26.3	57.9	10.5	5.3	0			
11	Identifikasi resiko	f	2	2	5	10	0	53	95	55.79
		%	10.5	10.5	26.3	52.6	0			
12	Analisis risiko	f	10	3	6	0	0	80	95	84.21
		%	52.6	15.8	31.6	0	0			
13	Mengelola risiko selama perubahan	f	5	3	5	6	0	64	95	67.37
		%	26.3	15.8	26.3	31.6	0			
Total Skor								351	475	73,9
Kategori								BAIK		

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer

Pada tabel 4.6 di atas, terlihat bahwa persentase total yang diperoleh dari seluruh pernyataan yang membentuk dimensi efisiensi dan efektifitas operasi adalah sebesar 73,9% dan termasuk dalam kategori baik.

c. Dimensi Kegiatan Pengendalian

Berikut disajikan skor tanggapan responden terhadap dimensi kegiatan pengendalian yang terdiri dari 10 pernyataan dengan pendekatan distribusi frekuensi dan persentase.

Tabel 4.7

Rekapitulasi Jawaban Responden Terhadap Kegiatan Pengendalian

N O	Pertanyaan	Skor Jawaban Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	(%)	
		SS	S	RR	TS	STS				
14	Review atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan	f	3	4	4	8	0	59	95	62.11
		%	15.8	21.1	21.1	42.1	0			
15	Pembinaan	f	0	4	8	7	0	54	95	56.84

	sumber daya manusia	%	0	21.1	42.1	36.8	0			
16	Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi	f	1	18	0	0	0	77	95	81.05
		%	5.3	94.7	0	0	0			
17	Pengendalian fisik atas asset	f	6	8	4	1	0	76	95	80.00
		%	31.6	42.1	21.1	5.3	0			
18	Penetapan dan reviu atas indicator dan ukuran kinerja	f	7	9	3	0	0	80	95	84.21
		%	36.8	47.4	15.8	0	0			
19	Pemisahan fungsi	f	5	11	2	1	0	77	95	81.05
		%	26.3	57.9	10.5	5.3	0			
20	Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting	f	5	9	4	1	0	75	95	78.95
		%	26.3	47.4	21.1	5.3	0			
21	Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian	f	7	9	3	0	0	80	95	84.21
		%	36.8	47.4	15.8	0	0			
22	Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya	f	5	11	2	1	0	77	95	81.05
		%	26.3	57.9	10.5	5.3	0			
23	Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya	f	6	8	4	1	0	76	95	80.00
		%	31.6	42.1	21.1	5.3	0			
24	Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan	f	7	9	3	0	0	80	95	84.21
		%	36.8	47.4	15.8	0	0			

kejadian penting									
Total Skor							811	1045	77,6
Kategori							BAIK		

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer

Pada tabel 4.7 di atas, dapat dilihat nilai persentase yang diperoleh dari pernyataan yang membentuk dimensi kegiatan pengendalian adalah sebesar 77,6% dan termasuk dalam katagori baik.

d. Dimensi Informasi dan Komunikasi

Berikut disajikan skor tanggapan responden terhadap dimensi informasi dan komunikasi yang terdiri dari 3 pernyataan dengan pendekatan distribusi frekuensi dan persentase.\

Tabel 4.8

Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Informasi dan Komunikasi

NO	Pertanyaan	Skor Jawaban Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	(%)	
		SS	S	RR	TS	STS				
25	Informasi	f	5	11	2	1	0	77	95	81.05
		%	26.3	57.9	10.5	5.3	0			
26	Komunikasi	f	6	8	4	1	0	76	95	80.00
		%	31.6	42.1	21.1	5.3	0			
27	Bentuk dan sarana komunikasi	f	7	9	3	0	0	80	95	84.21
		%	36.8	47.4	15.8	0	0			

Total Skor	233	285	81,75
Kategori	BAIK		

Pada tabel 4.8 di atas, dapat dilihat nilai persentase yang diperoleh dari pernyataan yang membentuk dimensi informasi dan komunikasi adalah sebesar 81,75% dan termasuk dalam katagori baik

e. **Dimensi Pemantauan**

Berikut disajikan skor tanggapan responden terhadap dimensi pemantauan yang terdiri dari 1 pernyataan dengan pendekatan distribusi frekuensi dan persentase.

Tabel 4.9

Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Pemantauan

NO	Pertanyaan	Skor Jawaban Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	(%)	
		SS	S	RR	TS	STS				
28	Pemantauan berkelanjutan	f	5	11	2	1	0	77	95	81.05
		%	26.3	57.9	10.5	5.3	0			
29	Evaluasi terpisah	f	3	4	4	8	0	59	95	62.11
		%	15.8	21.1	21.1	42.1	0			
30	Penyelesaian audit	f	4	8	7	0	0	73	95	76.84
		%	21.1	42.1	36.8	0	0			
Total Skor						209	285	73.3		
Kategori						BAIK				

Pada tabel 4.9 di atas, dapat dilihat nilai persentase yang diperoleh dari pernyataan yang membentuk dimensi informasi dan komunikasi adalah sebesar 73,3% dan termasuk dalam katagori baik.

Tabel 4.10
Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Variabel Sistem Pengendalian Internal (X₂)

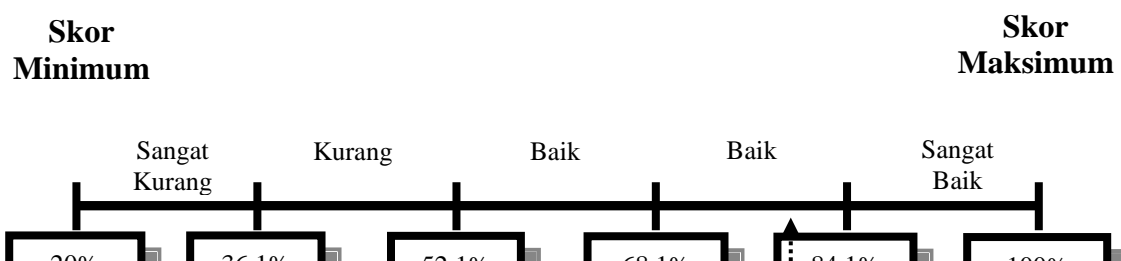
No	Dimensi	Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase (%)	Kategori
1	Lingkungan Pengendalian	562	760	73,9	Baik
2	Penilaian Resiko	351	475	73,9	Baik
3	Kegiatan Pengendalian	811	1045	77,6	Baik
4	Informasi dan Komunikasi	233	285	81,75	Baik
5	Pemantauan	209	285	73,3	Baik
Total		2166	2850	77,37	Baik

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer

Pada tabel 4.10 di atas, diketahui bahwa skor aktual yang diperoleh dari seluruh pertanyaan-pertanyaan yang membentuk variabel sistem pengendalian internal adalah sebesar 2166 dan skor ideal sebesar 2850 dengan nilai persentase yang diperoleh sebesar 77,37% dan termasuk dalam kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal di Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Jalan Wastukencana No.2 Bandung termasuk dalam kategori sangat baik. Kategori baik jika digambarkan dengan menggunakan garis kontinum maka hasilnya akan tampak sebagai berikut :

Gambar 4.2

Garis Kontinum Variabel Sistem Pengendalian Internal (X₂)



4.1.3 Kualitas Laporan Keuangan Keuangan Pemerintah Daerah

Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari 13 pernyataan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintah, untuk menghasilkan kualitas yang baik maka laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi 4 kualitatif karakteristik, yaitu: relevansi, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami yang kemudian dijadikan dimensi untuk variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berikut disajikan kecenderungan jawaban responden variabel kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan pendekatan distribusi frekuensi dan persentase.

a. Dimensi Relevansi

Berikut disajikan skor tanggapan responden terhadap dimensi relevansi yang terdiri dari 4 pernyataan dengan pendekatan distribusi frekuensi dan persentase:

Tabel 4.11
Rekapitulasi Jawaban Responden Terhadap Dimensi Relevansi

No	Pertanyaan	Skor Jawaban Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	(%)
		SS	S	RR	TS	STS			
1	Saya setuju bahwa LKPD	f	2	17	0	0	78	95	82.11
		%	10.	89.	0	0			

	di tempat saya bekerja dapat digunakan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu		5	5						
2	Saya setuju bahwa LKPD di tempat saya bekerja telah membantu dalam melakukan prediksi secara tepat	f	1	4	5	9	0	54	95	56.84
		%	5.3	21.1	26.3	47.4	0			
3	Saya berpendapat bahwa informasi dalam LKPD telah disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan	f	0	6	8	5	0	58	95	61.05
		%	0	31.6	42.1	26.3	0			
4	Saya berpendapat bahwa LKPD tempat saya bekerja telah menyajikan informasi akuntansi keuangan	f	0	1	6	12	0	46	95	48.42
		%	0	5.3	31.6	63.2	0			

pemerintah selengkap mungkin yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan									
Total Skor							236	380	62.10 %
Kategori							CUKUP BAIK		

Pada tabel 4.11 di atas, dapat dilihat bahwa persentase total skor yang diperoleh dari seluruh pernyataan yang membentuk dimensi relevansi adalah sebesar 62,10% dan termasuk dalam kategori cukup baik.

b. Dimensi Andal

Berikut disajikan skor tanggapan responden terhadap dimensi andal yang terdiri dari 5 pernyataan dengan pendekatan distribusi frekuensi dan persentase.

Tabel 4.12

Rekapitulasi jawaban Responden Terhadap Dimensi Andal

No	Pertanyaan	Skor Jawaban Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	(%)
		SS	S	RR	TS	STS			
5	Saya setuju informasi LKPD tempat saya bekerja telah berisi	f	1	17	1	0	76	95	80.00
		%	5.3	89.5	5.3	0			

	informasi yang jujur mengenai transaksi dan peristiwa lainnya dan disajikan secara wajar									
6	Saya setuju bahwa telah terdapat metode, prosedur dan ukuran yang jelas yang digunakan dalam menyusun LKPD tempat saya bekerja saat ini	f	2	4	12	1	0	64	95	67.37
		%	10.5	21.1	63.2	5.3	0			
7	Saya setuju bahwa telah adanya pendapat yang sama dari pihak lain yang independen mengenai LKPD	f	0	8	9	2	0	63	95	66.32
		%	0	42.1	47.4	10.5	0			
8	Saya setuju	f	1	17	1	0	0	76	95	80.00

	bahwa LKPD tempat saya bekerja telah diarahkan pada kebutuhan umum pengguna LKPD	%	5.3	89.5	5.3	0	0			
9	Saya setuju bahwa LKPD telah dibuat dengan tidak memihak kepada pihak-pihak tertentu	f	1	16	2	0	0	75	95	78.95
		%	5.3	84.2	10.5	0	0			
Total Skor								354	475	74.52%
Kategori								BAIK		

Pada tabel 4.12 diketahui bahwa persentase total skor yang diperoleh dari seluruh pernyataan yang membentuk dimensi andal adalah sebesar 74,52% dan termasuk dalam kategori baik.

c. Dimensi dapat Dibandingkan

Berikut disajikan skor tanggapan responden terhadap dimensi dapat dibandingkan yang terdiri dari 2 pernyataan dengan pendekatan distribusi frekuensi dan persentase.

Tabel 4.13

Rekapitulasi jawaban Responden Terhadap Dimensi dapat Dibandingkan

No	Pertanyaan	Skor Jawaban Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	(%)
		SS	S	RR	TS	STS			
10	Saya berpendapat bahwa LKPD tempat saya bekerja dapat dibandingkan dengan LKPD periode sebelumnya	f	0	18	1	0	75	95	78.95
		%	0	94.7	5.3	0			
11	Saya berpendapat bahwa item-item yang disajikan dalam LKPD pada suatu periode telah menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun	f	1	9	9	0	68	95	71.58
		%	5.3	47.4	47.4	0			
Total Skor						143	190	75.26%	
Kategori						BAIK			

Pada tabel 4.13 di atas, dapat dilihat bahwa nilai persentase yang diperoleh dari seluruh pernyataan yang membentuk dimensi dapat dibandingkan adalah sebesar 75,26% dan termasuk dalam kategori baik.

d. Dimensi dapat Dipahami

Berikut disajikan skor tanggapan responden terhadap dimensi dapat dipahami yang terdiri dari 2 pernyataan dengan pendekatan distribusi frekuensi dan persentase.

Tabel 4.14

Rekapitulasi jawaban Responden Terhadap Dimensi dapat Dipahami

No	Pertanyaan	Skor Jawaban Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	(%)	
		SS	S	RR	TS	STS				
12	Saya berpendapat bahwa LKPD yang dibuat saat ini dapat dipahami oleh pengguna LKPD	f	2	7	10	0	0	68	95	71.58
		%	10.5	36.8	52.6	0	0			
13	Saya berpendapat bahwa tidak ada hambatan dalam pemahaman pengguna LKPD tempat saya bekerja	f	0	12	7	0	0	69	95	72.63
		%	0	63.2	36.8	0	0			
Total Skor							137	190	72.10%	
Kategori							BAIK			

Pada tabel 4.14 di atas, dapat dilihat bahwa nilai persentase yang diperoleh dari seluruh pernyataan yang membentuk dimensi dapat dipahami adalah sebesar 72,1% dan termasuk dalam kategori baik.

Tabel 4.15

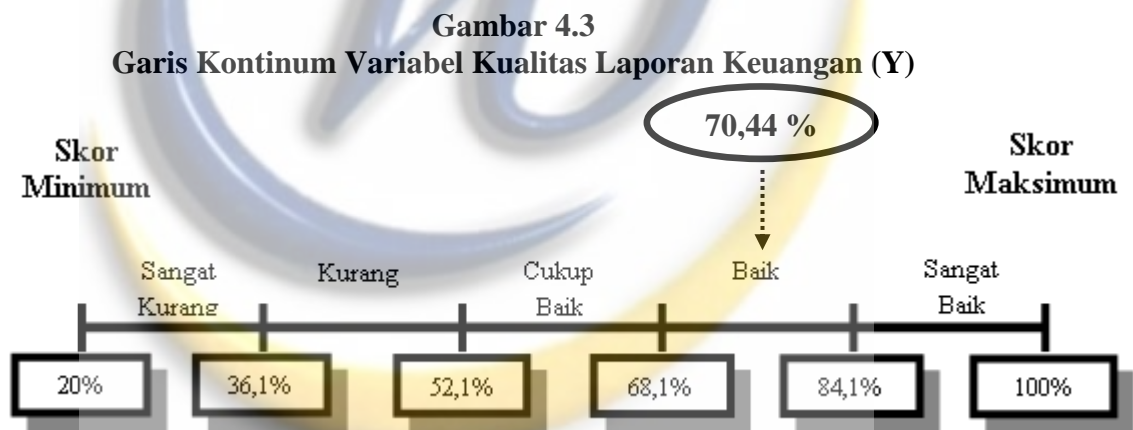
Rekapitulasi Jawaban Responden Terhadap Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

No	Dimensi	Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase (%)	Kategori
1	Relevansi	236	380	62.1%	Cukup Baik
2	Andal	354	475	74.52%	Baik
3	Dibandingkan	143	190	75.26%	Baik

4	Dipahami	137	190	72.10%	Baik
Total		870	1235	70,44%	Baik

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer

Pada tabel 4.15 di atas, diketahui bahwa skor aktual yang diperoleh dari seluruh pernyataan-pernyataan yang membentuk variabel kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah sebesar 870 dan skor ideal sebesar 1235 dengan nilai persentase yang diperoleh sebesar 70,44%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan di Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Jalan Wastukencana No.2 Bandung termasuk dalam kategori baik. Kategori baik jika digambarkan dengan menggunakan garis kontinum maka hasilnya akan tampak sebagai berikut :



4.1.4 Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner yang digunakan. Untuk menguji validitas dalam penelitian ini, penulis menggunakan nilai koefisien korelasi *Rank Spearman*. Uji validitas ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor total yang dihasilkan oleh masing-masing responden dengan skor masing-masing item. Instrumen dapat dinyatakan valid apabila hasil perhitungan koefisien korelasi menunjukkan koefisien korelasi

sebesar 0,3 atau lebih (Sugiyono, 2004). Uji reliabilitas data digunakan untuk menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran telah konsisten apabila dilakukan dua kali atau lebih dari gejala yang sama. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan teknik *Cronbach's Alpha*. Instrumen dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,70 (Sekaran, 2006).

Tabel 4.16
Hasil Uji Validitas Variabel dan Realibilitas Variabel X₁
(Sumber Daya Manusia)

Variabel	Pernyataan	Koefisien Validitas	Titik Kritis	Kesimpulan
Sumber Daya Manusia (X ₁)	1	0,763	0,300	Valid
	2	0,799	0,300	Valid
	3	0,918	0,300	Valid
	4	0,802	0,300	Valid
	5	0,874	0,300	Valid
	6	0,898	0,300	Valid
	7	0,463	0,300	Valid
	8	0,189	0,300	Valid
	9	0,898	0,300	Valid
	10	0,764	0,300	Valid
	11	0,755	0,300	Valid
	12	0,802	0,300	Valid
	13	0,918	0,300	Valid
	14	0,854	0,300	Valid
	15	0,666	0,300	Valid
Koefisien Reliabilitas			0,719	
Titik Kritis			0,700	
Kesimpulan			Reliabel	

Dari tabel 4.16 di atas, dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan yang membentuk variabel Sumber Daya Manusia memiliki nilai koefisien validitas > titik kritis (0,300) sehingga seluruh pernyataan tersebut dinyatakan **Valid**. Sedangkan untuk koefisien reliabilitas (*cronbach alpha*) diperoleh nilai 0,719 > 0,700 dan dinyatakan **Reliabel**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh

pernyataan sudah mengukur apa yang seharusnya di ukur dan dapat digunakan dalam penelitian.

Selanjutnya hasil rekap pengujian validitas dan realibilitas untuk variabel X₂ (Sistem Pengendalian Internal) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.17
Hasil Uji Validitas dan Realibilitas Variabel X₂
(Sistem Pengendalian Internal)

Variabel	Pernyataan	Koefisien Validitas	Titik Kritis	Kesimpulan
Sistem Pengendalian Internal (X ₂)	1	0,424	0,300	Valid
	2	0,465	0,300	Valid
	3	0,330	0,300	Valid
	4	0,517	0,300	Valid
	5	0,561	0,300	Valid
	6	0,553	0,300	Valid
	7	0,741	0,300	Valid
	8	0,418	0,300	Valid
	9	0,506	0,300	Valid
	10	0,562	0,300	Valid
	11	0,759	0,300	Valid
	12	0,750	0,300	Valid
	13	0,689	0,300	Valid
	14	0,750	0,300	Valid
	15	0,536	0,300	Valid
	16	0,698	0,300	Valid
	17	0,572	0,300	Valid
	18	0,763	0,300	Valid
	19	0,759	0,300	Valid
	20	0,854	0,300	Valid
	21	0,645	0,300	Valid
	22	0,698	0,300	Valid
	23	0,544	0,300	Valid
	24	0,822	0,300	Valid
	25	0,597	0,300	Valid
	26	0,787	0,300	Valid
	27	0,691	0,300	Valid
	28	0,608	0,300	Valid

	29	0,596	0,300	Valid
	30	0,704	0,300	Valid
Koefisien Reliabilitas			0,880	
Titik Kritis			0,700	
Keterangan			Reliabel	

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer

Dari tabel 4.17 di atas, dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan yang membentuk variabel Sistem Pengendalian Internal memiliki nilai koefisien validitas > titik kritis (0,300) sehingga seluruh pernyataan tersebut dinyatakan **Valid**. Sedangkan untuk koefisien reliabilitas (*cronbach alpha*) diperoleh nilai 0,880 > 0,700 dan dinyatakan **Reliabel**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan sudah mengukur apa yang seharusnya di ukur dan dapat digunakan dalam penelitian.

Selanjutnya hasil rekap pengujian validitas dan realibilitas untuk variabel Y (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.18
Hasil Uji Validitas Variabel Y
(Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah)

Variabel	Pernyataan	Koefisien Validitas	Titik Kritis	Kesimpulan
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	1	0,825	0,300	Valid
	2	0,720	0,300	Valid
	3	0,767	0,300	Valid
	4	0,722	0,300	Valid
	5	0,934	0,300	Valid
	6	0,779	0,300	Valid
	7	0,913	0,300	Valid
	8	0,952	0,300	Valid
	9	0,727	0,300	Valid
	10	0,816	0,300	Valid
	11	0,809	0,300	Valid
	12	0,964	0,300	Valid
	13	0,788	0,300	Valid

Koefisien Reliabilitas	0,968
Titik Kritis	0,700
Keterangan	Reliabel

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer

Dari tabel 4.18 di atas, dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan yang membentuk variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memiliki nilai koefisien validitas $>$ titik kritis (0,300) sehingga seluruh pertanyaan tersebut dinyatakan **Valid**. Sedangkan untuk koefisien reliabilitas (*cronbach alpha*) diperoleh nilai $0,968 > 0,700$ dan dinyatakan **Reliabel**. sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan sudah mengukur apa yang seharusnya di ukur dan dapat digunakan dalam penelitian.

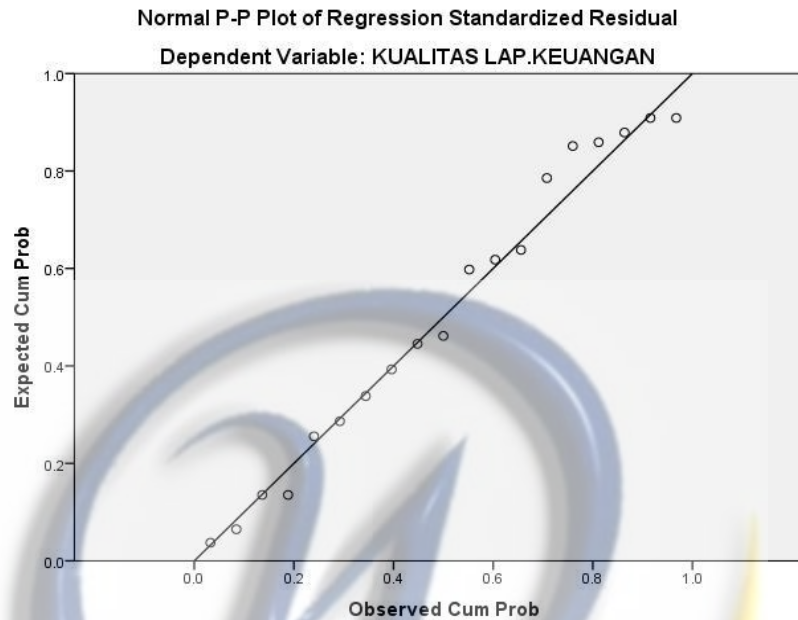
Hasil uji ini mengindikasikan bahwa semua butir pernyataan yang diajukan pada ketiga variabel valid dan layak digunakan sebagai alat ukur untuk penelitian dan dapat diikutsertakan pada analisis selanjutnya.

4.1.5 Pengujian Asumsi Klasik

4.1.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang digunakan memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan P-P Plot Test. Pengujian normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik distribusi normal, dan hasilnya dapat dilihat pada gambar 4.4 berikut :

Gambar 4.4



4.1.5.2 Uji Heteroskedastisitas

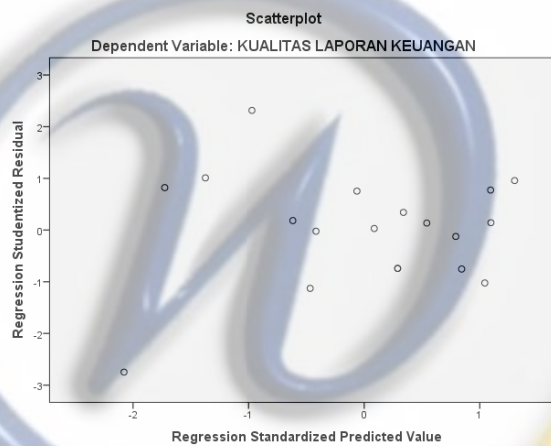
Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastis dan jika berbeda disebut heteroskedastis. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas.

Cara untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Deteksi ada tidaknya heteroskedastis dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di *studentized*. Dengan dasar analisis sebagai berikut:

- c) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu dan teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan terjadinya heteroskedastis.
- d) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastis.

Gambar 4.5

Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan *scatterplot* di atas, terlihat bahwa titik-titik koordinat menyebar tidak beraturan atau menyebar secara acak, yang menunjukkan tidak ditemukannya indikasi pelanggaran gejala heteroskedastisitas dalam data.

Dikarenakan semua uji asumsi klasik telah terpenuhi dan tidak ada pelanggaran, maka data layak dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda.

4.1.5.3 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol (Ghozali, 2006: 911). Model regresi yang baik seharusnya adalah yang tidak terjadi korelasi di antara variabel-variabel bebas. Pengujian multikolinieritas dilakukan dengan menghitung nilai VIF (*Variance Inflating Factor*). Uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat *tolerance value* dan *variance inflation factor* (VIF), kriteria pengujian apabila terdapat variabel bebas yang memiliki nilai *tolerance value* > 0,1 dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas dalam data sehingga asumsi nonmultikolinieritas terpenuhi.

Berikut hasil uji multikolinieritas dengan menggunakan bantuan program SPSS 20.00 for windows.

Tabel 4.19
Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
SDM	,954	1,049
SPI	,954	1,049

Dari tabel output diatas, diketahui bahwa nilai *tolerance* kedua variabel bebas (0,954) > 0,1 dan nilai VIF kedua variabel tersebut (1,049) < 10. Dengan

demikian maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam data.

4.1.6 Analisis Regresi Linier Berganda

Persamaan regresi linier berganda yang akan dibentuk adalah :

$$\hat{Y} = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Di mana:

Y = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

a = Konstanta

b_1 = Koefisien Regresi Sumber Daya Manusia

b_2 = Koefisien Regresi Sistem Pengendalian Internal

X = Sumber Daya Manusia

X₂ = Sistem Pengendalian Internal

e = Kesalahan (error)/ tingkat pengganggu

Dengan bantuan program SPSS 19.00 for windows, diperoleh hasil analisis regresi linier berganda sebagai berikut:

Tabel 4.20
Persamaan Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	21.860	5.770		3.789	.002
SDM	.272	.100	.480	2.713	.015
SPI	.090	.036	.447	2.531	.022

a. Dependent Variable: KUALITAS LAP.KEUANGAN

Dari tabel output di atas, diketahui bahwa nilai a yang diperoleh adalah sebesar -21,860 nilai $b_1 = 0,272$ dan nilai b_2 sebesar 0,90, sehingga dapat dibentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$\hat{Y} = 21,860 + 0,272X_1 + 0,90X_2 + e$$

Persamaan di atas dapat di artikan sebagai berikut :

1. $a = 21,860$ artinya jika variabel sumber daya manusia (X_1) dan sistem pengendalian internal (X_2) bernilai nol (0) maka variabel kualitas laporan keuangan (Y) akan bernilai 21,860.
2. $0,272$, artinya jika variabel sumber daya manusia (X_1) meningkat sebanyak satu satuan, maka variabel kualitas laporan keuangan (Y) akan meningkat sebesar 0,272.
3. $0,90$, artinya jika variabel sistem pengendalian internal (X_2) meningkat sebanyak satu satuan, maka variabel kualitas laporan keuangan (Y) akan meningkat sebesar 0,90.

4.1.6.1 Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (KD) merupakan kuadrat dari koefisien korelasi (R) atau disebut juga sebagai *R-Square*. Koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pengaruh sumber daya manusia (X_1) dan sistem

pengendalian internal (X_2) secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan menggunakan *software SPSS 19.00*, diperoleh koefisien determinasi yang dapat dilihat pada tabel output berikut :

Tabel 4.21
Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.723 ^a	.523	.463	1.82052

a. Predictors: (Constant), SPI, SDM

b. Dependent Variable: KUALITAS LAP.KEUANGAN

Dari tabel output di atas, diketahui bahwa nilai koefisien determinasi atau *R Square* yang diperoleh adalah sebesar 0,523 atau 52,3%. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal memberikan kontribusi pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 52,3%, sedangkan sisanya sebesar $100\% - 52,3\% = 57,7\%$ merupakan pengaruh variabel lain yang tidak diteliti.

4.1.6.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Hasil uji F dalam penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.22

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	58.129	2	29.064	8.769	.003 ^a
	Residual	53.029	16	3.314		
	Total	111.158	18			

- a. Predictors: (Constant), SPI, SDM
- b. Dependent Variable: KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (uji f) pada tabel 4.22 , didapat nilai signifikansi model regresi secara simultan sebesar 0,006. Nilai ini lebih kecil dari *significance level* 0,05% , yaitu $0,003 < 0,05$. Selain itu dapat dilihat juga dari hasil perbandingan antara f_{hitung} dan f_{tabel} yang menunjukkan nilai f_{hitung} sebesar 8,769, sedangkan f_{tabel} sebesar 2,46. Dari hasil tersebut terlihat bahwa $f_{hitung} > f_{tabel}$ yaitu $8,769 > 2,21$, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan atau secara bersama-sama variabel sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4.1.6.3 Uji Parsial (Uji T)

Berikut ini adalah hasil dari pengujian hipotesis secara parsial menggunakan uji t.

Tabel 4.23
Uji Parsial
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	21.860	5.770		3.789	.002
SDM	.272	.100	.480	2.713	.015
SPI	.090	.036	.447	2.531	.022

a. Dependent Variable: KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk variabel SDM diperoleh $t_{hitung} = 2,713 > t_{tabel} = 2,093$ maka H_0 ditolak

Untuk variabel SPI diperoleh $t_{hitung} = 2,531 > t_{tabel} = 2,093$ maka H_0 ditolak

Dari uji hipotesis individu diatas dengan statistik uji t, maka dapat dikatakan seluruh variabel SDM dan Sistem Pengendalian Internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dikarenakan nilai t_{hitung} variabel tersebut lebih besar dari nilai t_{tabel} .

4.2 Pembahasan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, Penulis melakukan pembahasan mengenai Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

4.2.1 Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa peningkatan Sumber Daya Manusia mampu untuk meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sehingga, dengan meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia dapat mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Dari hasil pengujian menyatakan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia signifikan mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah secara parsial, dengan pengujian dua pihak dimana tingkat signifikansi sebesar 0,05 maka di dapat t_{tabel} sebesar 2,093 dan t_{hitung} sebesar 2,713, sehingga $2,093 < t_{hitung} < 2,713$. Berdasarkan formula yang diuraikan pada pengujian hipotesis, maka H_0 ditolak. Artinya Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini dikarenakan semakin baik kompetensi yang dimiliki oleh Sumber Daya Manusia pada DPKAD dalam hal penyusunan laporan keuangan akan membuat laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih baik

Berdasarkan hasil jawaban responden dapat digambarkan bahwa indikator kompetensi Sumber Daya Manusia pada DPKAD sebagai berikut

a. Latar Belakang Pendidikan

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa total skor jawaban responden mengenai latar belakang pendidikan adalah 233 dari skor ideal yaitu 380. Hal ini menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan sumber daya manusia pada DPKAD telah cukup sesuai dengan bidang pekerjaan yang dibutuhkan. Dimana terdapat 1 orang pegawai dari pendidikan akuntansi, 2 orang ilmu perbankan, 11 orang ilmu pemerintahan dan 5 orang ilmu manajemen. Kemudian terdapat 4 orang pendidikan S2, 7 orang pendidikan S1, dan 8 orang D3. Dimana sebagian besar pegawai memiliki masa kerja 11-15 tahun.

b. Pendidikan dan Pelatihan

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa total skor jawaban responden mengenai pendidikan dan pelatihan adalah 596 dari skor ideal 855. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh DPKAD bagi para karyawann bidang akuntansi telah dilaksanakan dengan baik. Dimana pelatihan yang dilaksanakan antara lain pendidikan dan pelatihan keuangan, pelayanan, kecakapan manajerial, dan produktifitas kerja.

c. Pengalaman di Bidang Akuntansi

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa total skor jawaban responden mengenai pendidikan dan pelatihan adalah 144 dari skor ideal 190. Hal ini menunjukkan bahwa para karyawan DPKAD memiliki pengalaman yang cukup di bidang akuntansi. Dimana dapat dilihat bahwa dimana seluruh pegawai DPKAD di bidang akuntansi menyatakan bahwa telah memahami teori teori yang berkaitan dengan keuangan dan memahami aturan-aturan dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan PP NO 70 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

4.2.2 Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil jawaban responden dapat digambarkan bahwa indikator Sistem Pengendalian Internal pada DPKAD sebagai berikut

a. Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui bahwa total skor jawaban responden mengenai lingkungan pengendalian adalah sebesar 562 dari skor ideal 760. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian pada DPKAD telah berjalan dengan baik. Dimana penekanan, integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi yang dibutuhkan oleh DPKAD. Pemimpin yang melaksanakan pengendalian dengan baik, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, dibuatnya kebijakan-kebijakan tentang pembinaan sumber daya manusia serta terciptanya hubungan yang baik dengan instansi pemerintah terkait telah dinyatakan oleh responden dalam kategori baik.

b. Penilaian resiko

Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui bahwa total skor jawaban responden mengenai penilaian resiko adalah sebesar 351 dari skor ideal 475. Hal ini menunjukkan bahwa DPKAD telah mampu menilai resiko terkait aktifitas yang dilakukan oleh DPKAD. Resiko yang dihadapi oleh DPKAD antara lain kemungkinan pandangan buruk publik terhadap kinerja DPKAD, terjadi kemungkinan pelaporan asset yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, adanya kemungkinan ketidak sesuaian pencatatan terhadap jumlah asset yang dimiliki oleh DPKAD akibat kurangnya bukti atau laporan, atau tidak dilakukannya *update* data oleh DPKAD.

c. Kegiatan Pengendalian

Berdasarkan Tabel 4.10 dapat diketahui bahwa total skor jawaban responden mengenai kegiatan pengendalian adalah 811 dari skor ideal 1045. Hal ini menunjukkan bahwa DPKAD telah melakukan aktifitas

pengendalian dengan baik terkait aktifitas yang dilakukan. Dimana aktifitas pengendalian antara lain adanya pejabat tinggi atau senior yang mengawasi mekanisme di DPKAD terhadap rencana yang telah disusun, diberikan orientasi, pelatihan dan dukungan sarana prasarana lainnya dalam menjalankan tugas, disusunnya transaksi pengendali yang menjadi alat untuk mencocokkan jumlah-jumlah transaksi yang dibuat, adanya aktifitas pemeriksaan dan pencatatan terhadap akses dokumen serta peralatan pengolahan data pada bagian pembukuan, dibuatnya indikator pengukuran kinerja serta dilakukan revidu untuk setiap bagian di DPKAD, adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab sesuai fungsi akuntansi khususnya baik dalam pencatatan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, adanya otorisasi terhadap kegiatan-kegiatan dalam penyusunan LKPD.

d. Informasi dan Komunikasi

Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui bahwa total skor jawaban responden mengenai informasi dan komunikasi adalah sebesar 233 dari skor ideal 285. Hal ini menunjukkan bahwa informasi dan komunikasi pada DPKAD dikatakan baik. Setiap aktifitas dari DPKAD memiliki catatan, laporan guna menjadi informasi yang dapat dikomunikasikan dengan baik di antara para personel DPKAD. Informasi tersebut terkait dengan bukti transaksi dan laporan terhadap transaksi yang dilakukan di DPKAD, adanya pengkomunikasian bukti transaksi dan laporannya terhadap pejabat dan pihak yang berwenang dalam mengotorisasi laporan keuangan pemerintah daerah, laporan yang dibuat dikomunikasikan dan diotorisasi dengan tepat waktu oleh pejabat yang berwenang dalam mengotorisasi laporan tersebut.

e. Aktivitas Pemantauan

Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui bahwa total skor jawaban responden mengenai aktivitas pemantauan adalah sebesar 209 dari skor ideal 285. Hal ini menunjukkan bahwa aktifitas pemantauan pada

DPKAD telah berjalan dengan baik. Ini pun telah menggambarkan bahwa DPKAD melaksanakan rekomendasi mengenai pengendalian internal, melakukan evaluasi secara terpisah terhadap temuan audit, serta melakukan tindak lanjut dari temuan audit. Dimana adanya temuan audit mengenai masih banyaknya asset pemerintah kota Bandung yang belum dicatat, terdapat tumpang tindih dalam surat ketetapan pajak daerah mengenai kewenangan pajak daerah tertentu dan dalam hal ini DPKAD melakukan tindak lanjut dengan pelaksanaan perbaikan struktur internal dalam hal dokumentasi atas asset dan dipantau langsung oleh pejabat DPKAD.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan Sistem Pengendalian Internal memiliki pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal signifikan mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara parsial, dengan pengujian dua pihak dimana tingkat signifikansi sebesar 0,05 maka di dapat t_{tabel} sebesar 2,093 dan t_{hitung} sebesar 2,531. Sehingga $2,531 > t_{tabel}$. Berdasarkan formula yang diuraikan pada pengujian hipotesis, H_0 ditolak. Artinya, Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas pengendalian internal memiliki peran yang cukup signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4.2.3 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

laporan keuangan merupakan bentuk pertanggung jawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Maka dari itu laporan keuangan harus memiliki kualitas yang baik

Berdasarkan hasil jawaban responden mengenai indikator Kualitas Laporan Keuangan Daerah maka peneliti melakukan pembahasan sebagai berikut.

1. Memiliki manfaat dan umpan balik

Berdasarkan tabel 4.11 diketahui skor jawaban responden mengenai indikator ini sebesar 78 dari skor ideal 95. Hal ini menunjukkan bahwa Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh DPKAD memiliki manfaat

dan dapat dijadikan umpan balik bagi para pengguna laporan keuangan daerah. Dimana LKPD yang disusun dapat digunakan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi jajaran DPKAD dimasa lalu sehingga mereka dapat melihat kemungkinan hal-hal yang akan terjadi dimasa depan. Sehingga dapat dilakukan analisa baik oleh DPKAD kota bandung dan pemerintah pusat dalam menentukan kinerja dimasa yang akan datang.

2. Memiliki manfaat prediktif

Berdasarkan tabel 4.11 diketahui skor jawaban responden terhadap indikator manfaat prediktif adalah sebesar 54 dari skor ideal 95. Artinya dalam hal ini LKPD yang dihasilkan dianggap cukup mampu memprediksi secara tepat mengenai kondisi keuangan di masa yang akan datang sesuai dengan apa yang telah dicapai di masa lalu.

3. Tepat waktu

Berdasarkan tabel 4.11 diketahui skor jawaban responden terhadap indikator tepat waktu adalah sebesar 58 dari skor ideal 95. Artinya dalam hal ini LKPD yang dihasilkan oleh DPKAD cukup tepat waktu penyajiannya. Hal ini pun menggambarkan cukup efektifnya kinerja dari DPKAD dalam menyajikan LKPD tepat waktu. LKPD Kota Bandung disampaikan dalam periode sesuai dengan peraturan yaitu pada masa 3 bulan setelah periode anggaran berakhir.

4. Lengkap

Berdasarkan tabel 4.11 diketahui skor jawaban responden terhadap indikator kelengkapan laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebesar 46 dari skor ideal 95. Artinya dalam hal ini LKPD yang dihasilkan dianggap belum menyajikan secara lengkap informasi akuntansi . Kelengkapan LKPD tersebut dapat diukur melalui kelengkapan dokumen-dokumen pendukung / bukti terkait jumlah-jumlah akun yang terdapat dalam LKPD. Dimana hasil temuan BPK

tahun 2010 bahwa terdapat dana hibah bantuan social yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar 40 milyar rupiah. Serta BPK pada tahun 2011 menyatakan bahwa tidak ada laporan pertanggungjawaban dari bendahara pemerintah kota bandung.

5. Penyajian secara jujur

Berdasarkan tabel 4.12 diketahui skor jawaban responden terhadap indicator penyajian secara jujur adalah sebesar 76 dari skor ideal 95. Hal ini menunjukkan bahwa informasi yang tersaji di LKPD dinyatakan secara jujur dan disajikan secara wajar. LKPD yang disajikan secara jujur dan wajar adalah LKPD yang ditransaksikan sesuai dengan kenyataan dan sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan.

6. Dapat diverifikasi

Berdasarkan tabel 4.12 diketahui skor jawaban responden terhadap indikator dapat diverifikasi melalui 2 butir pertanyaan adalah sebesar 127 dari skor ideal 190. Hal ini menunjukkan bahwa telah terdapat metode, prosedur, dan ukuran yang jelas dalam menyusun LKPD sehingga dapat diverifikasi. Hal ini seperti dilihat bahwa LKPD telah disusun berdasarkan nilai mata uang rupiah, susunan terhadap LKPD yang meliputi LRA, Neraca, Laporan Arus Kas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan, serta sumber data yang digunakan berdasarkan bukti dan telah diotorisasi oleh Ketua DPKAD Bidang Akuntansi.

7. Netral

Berdasarkan tabel 4.12 diketahui skor jawaban responden terhadap indicator penyajian secara jujur melalui 2 butir pernyataan adalah sebesar 151 dari skor ideal 190. Hal ini menunjukkan bahwa informasi yang tersaji di LKPD telah dibuat secara independen dan diarahkan pada kebutuhan umum pengguna. Dalam hal ini LKPD telah dibuat tanpa adanya intervensi dari pihak manapun dan tidak memihak/ dibuat demi menguntungkan satu pihak baik DPKAD maupun kepentingan

pribadi pihak pihak yang menggunakan LKPD.

8. Konsistensi

Berdasarkan tabel 4.13 diketahui skor jawaban responden terhadap indicator penyajian secara jujur adalah sebesar 75 dari skor ideal 95. Hal ini menunjukkan bahwa informasi yang tersaji di LKPD dinyatakan secara konsisten pada setiap periodenya yakni periode 2010 sampai dengan 2012.

9. Dapat dibandingkan

Berdasarkan 4.13 diketahui skor jawaban terhadap indicator dapat dibandingkan adalah sebesar 68 dari skor ideal 95. Hal ini menunjukkan bahwa informasi yang dicantumkan dalam LKPD dapat dibandingkan dengan LKPD periode sebelumnya. Dalam hal ini adalah dimana informasi mengenai kondisi asset , hutang , serta penggunaan dana dan anggaran dapat dibandingkan peningkatan/penurunannya dari periode masa kini dan masa lalu. Sebagai contoh yang ditunjukkan dalam Neraca Pemerintah Kota Bandung Tahun 2010 yang menunjukkan total asset sebesar Rp. 20.298.237.666.923,05. Jika dibandingkan dengan total asset tahun 2009 yaitu Rp. 19.788.968.828.372,89 maka total asset pemerintah kota Bandung mengalami kenaikan sebesar Rp. 509.268.838.551.

10. Dapat dipahami

Berdasarkan tabel 4.14 diketahui skor jawaban responden terhadap indicator penyajian secara jujur melalui 2 butir pernyataan adalah sebesar 143 dari skor ideal 190. Hal ini menunjukkan bahwa informasi yang tersaji di LKPD dapat dipahami oleh para pengguna LKPD yakni para pegawai di DPKAD , BPK selaku pemeriksa laporan keuangan pemerintah, serta khalayak umum . Hal ini juga dapat ditegaskan dengan penggunaan bahasa, istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna tersebut.

BAB V

Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti mengenai hubungan Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada DPKAD Kota Bandung).

Besarnya pengaruh antar variabel yang diteliti sesuai dengan hasil pembahasan adalah sebagai berikut :

- 1. Besarnya Pengaruh Sumber Daya Manusia bidang akuntansi pada DPKAD Kota Bandung**

Dapat disimpulkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi di DPKAD Kota Bandung memiliki pengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini ditunjukkan dari hasil pengujian secara parsial dimana tingkat signifikansi sebesar 0,015.

- 2. Besarnya Pengaruh Sistem Pengendalian Internal pada DPKAD Kota Bandung**

Dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Internal Akuntansi di DPKAD Kota Bandung memiliki pengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini ditunjukkan

dari hasil pengujian secara parsial dimana tingkat signifikansi sebesar 0,022.

Analisis model regresi data yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai variabel dependen. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dijelaskan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hal ini terlihat dari hasil pengujian anova / uji F yang memiliki p value = 0,003 < tingkat signifikan yang ditetapkan 0.05 / 5%. Selain itu Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal mampu menerangkan variabel kualitas laporan pemerintah daerah sebesar 52.3% dimana sisanya sebesar 57,7% merupakan faktor-faktor lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

5.2 Saran

1. Bagi DPKAD Kota Bandung diharapkan mampu menambahkan jumlah pegawai yang dimiliki kompetensi lebih di bidang akuntansi dan keuangan hal ini berdasarkan hasil penelitian bahwa diketahui pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi sebanyak 1 orang dan yang berlatar belakang pendidikan perbankan sebanyak 2 orang sehingga dengan adanya penambahan pada sumber daya manusia dengan latar belakang pendidikan akuntansi dan perbankan diharapkan mampu semakin memperbaiki kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung.

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menguji variabel-variabel lain yang berhubungan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Hal ini sesuai dengan hasil koefisien determinasi yang menunjukkan bahwa 57,7% adalah faktor-faktor lain yang tidak digunakan dalam model penelitian. Selain itu peneliti selanjutnya mampu memperluas sampel dalam penelitian atau dengan menguji hubungan antara Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah di Kota / Kabupaten lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Wiwik. 2010. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan). Dalam *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, 5 (1): h: 69-80.
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Arens, Alvin A., et al. (2006). *Auditing dan Jasa Assurance*. Jakarta: Erlangga. Alih Bahasa: Herman Wibowo. Editor: Wibi Hardani, dan Suryadi Saat.
- Badjuri, Achmad dan Elisa, Trihapsari, 2004, "Audit Kinerja pada Organisasi Sektor Publik Pemerintah."
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- BPK RI. 2012. *Penyampaian LHP BPK RI atas LKPD TA 2011: BPK RI berikan opini WTP untuk Pemprov Jabar dan Pemkot Banjar*. Diakses pada tanggal 8 Oktober 2012, dari <http://bandung.bpk.go.id/web/?p=3932>
- BPK RI. 2010. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat dan Delapan LKPD Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Diakses pada tanggal 8 Oktober 2012, dari <http://bandung.bpk.go.id/web/?p=793>
- Choirunisah, Fariziah. 2008. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan sistem akuntansi instansi. Tesis Maksi UGM, Yogyakarta.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi 3. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- _____. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2008. *Teori Akuntansi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hutapea, Parulian dan Nurianna Thoha. 2008. *Kompetensi Plus*. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

- Indriasari, Desi dan Ertambang Nahartyo. 2008. Pengaruh kapasitas sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (studi pada pemerintah kota Palembang dan kabupaten Ogan Ilir). *SNA XI Pontianak*.
- Matindas, R. 2002. *Managemen SDM Lewat Konsep Ambisi, Kenyataan, dan Usaha*, Edisi II. Jakarta: Grafiti.
- Moeheriono. 2009. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 *tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 *tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 *tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Riduwan. 2002. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Roe, R.A. (2001). *Competencies and competence management*. Paper European Congress for W&O Psychology, Prague, May 16-19, 2001.
- Siagian, Sondang P. 2002. *Teori Pengembangan Organisasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2012. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta : salemba empat.
- _____. 2007. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis buku 1 Edisi 4*. Jakarta : salemba empat.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 *tentang Keuangan Negara*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan*.
- Warisno. 2008. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi". Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Winidyaningrum, C., dan Rahmawati. 2010. Pengaruh sumberdaya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan

ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening pengendalian intern akuntansi. *SNA XIII Purwokerto*

Zulganef. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial dan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Xu, Hongjiang, Jeretta H.N., G. Daryl Nord, Binshan Lin. 2003. "Key issue of accounting information quality management : Australian case studies". *Industrial Mangement & Data System* 103/7, 461- 470.

